

**LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2005**



Diterbitkan : 5 Oktober 2005

Data : 2004-2005



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROPINSI LAMPUNG**

BAPEDALDA KOTA BANDAR LAMPUNG

Alamat : Jl. Prof.Moh. Yamin .S.H. No 33 Rawa Laut
Bandar Lampung
Telp : 0721-252590
Fax : 0721-252590
E-mail : -
Web : -

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Bandar Lampung telah dapat menyelesaikan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005. Terwujudnya laporan ini berkat kerjasama yang baik antara instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandar Lampung tahun 2005 tersusun berdasarkan data demografi, sosial ekonomi, sumber daya manusia dan sumber pencemaran serta analisis kebijakan Kota Bandar Lampung. Data yang disajikan bersumber dari Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon saran kritik serta masukan demi penyempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandar Lampung tahun 2005 ini kami mengucapkan banyak terima kasih.

Bandar Lampung, Oktober 2005

BAPEDALDA KOTA BANDAR LAMPUNG

Spala



SYAHRIL ANWAR, S.H.M.M.

60-015-016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum Wilayah	1
1.2 Pembangunan Berkelanjutan	6
1.3 Isu-isu Lingkungan Hidup	8
1.4 Maksud dan Tujuan	19
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	21
2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah	21
2.2 Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	23
2.3 Kebijakan Tata Ruang	27
2.4 Kebijakan Sosial Ekonomi dan Budaya	28
BAB III. ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN	31
3.1 Konsep Dasar Analisis dan Evaluasi	31
3.2 Sumberdaya Alam	33
3.2.1 Sumberdaya Lahan	33
3.2.2 Sumberdaya Hutan	35
3.2.3 Sumberdaya Air	41
3.2.4 Sumberdaya Mineral	46
3.2.5 Sumberdaya Udara	48
3.2.6 Rawa (Lahan Basah)	52
3.2.7 Sumberdaya Pesisir dan Lautan	58
3.2.8 Keanekaragaman Hayati	66
3.3 Sumberdaya Buatan	67
3.3.1 Perekonomian Daerah Bandar Lampung	67
3.3.2 Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	70
3.3.3 Pencemaran Udara	75

3.3.4 Pencemaran Air	81
3.3.5 Limbah Padat.....	84
3.4 Sumberdaya Manusia	87
3.4.1 Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk.....	87
3.4.2 Fertilitas	89
3.4.3 Pendidikan	90
3.4.4 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	92
BAB IV. REKOMENDASI.....	94

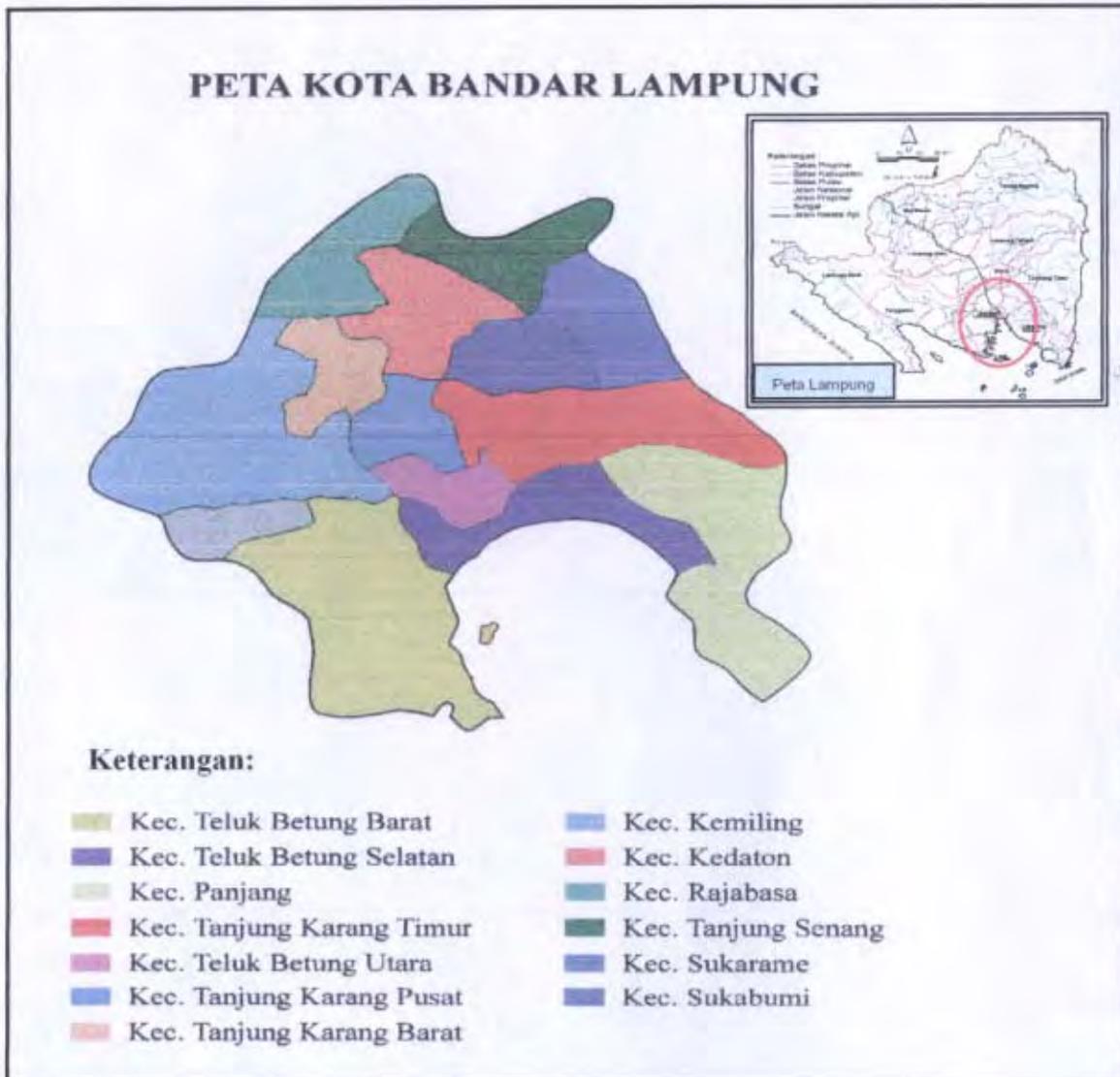
DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

sangatlah beragam mulai dari dataran pantai sampai ke kawasan perbukitan hingga gunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai dengan 700 m dpl. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian wilayah meliputi :

- Daerah Pantai, yaitu sekitar Teluk Betung dan Panjang serta pulau-pulau kecil di bagian selatan.
- Daerah Perbukitan, yaitu Teluk Betung bagian Utara.
- Daerah Dataran Tinggi serta sedikit bergelombang, terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampak di bagian timur selata.
- Wilayah Landai/Dataran, terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di bagian utara.

Ditengah-tengah mengalir sungai-sungai yaitu Way Halim, Way Balau, Way Awi, dan Way Simpur. Di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung mengalir Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, dan Way Kuwala. Daerah hulu sungai berada di bagian barat, daerah hilir sungai berada di bagian selatan yaitu pada dataran pantai . Luas wilayah yang datar sampai landai 60 %, landai sampai miring 35 %, dan sangat miring sampai curam 4 %.



Gambar 1.1 Peta Kota Bandar Lampung

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson (1951) dalam Damai(2003), iklim wilayah penelitian tergolong tipe A; sedangkan menurut zone agroklimat Oldeman (1978) dalam Damai (2003), tergolong Zone D3, yang berarti lembab sepanjang tahun. Curah hujan berkisar antara 2.257 – 2.454 mm/tahun. Jumlah hari hujan 76-166

PENDAHULUAN

hari/tahun. Kelembaban udara berkisar 60-85%, dan suhu udara 23-37°C. Kecepatan angin berkisar 2,78-3,80 knot dengan arah dominan dari Barat (Nopember-Januari), Utara (Maret-Mei), Timur (Juni-Agustus), dan Selatan (September-Oktober).

Parameter iklim yang sangat relevan untuk perencanaan wilayah perkotaan adalah curah hujan maksimum, karena terkait langsung dengan kejadian banjir dan desain sistem drainase. Berdasarkan data selama tahun 2004 yang tercatat di stasiun klimatologi Pahoman-Sumur Batu, Kubang (Kecamatan Panjang), Sukabumi-(Kecamatan Sukarame), Sumur Putri (Kecamatan Teluk Betung Utara), dan Langkapura (Kecamatan kemiling), curah hujan maksimum terjadi antara bulan Desember sampai dengan April, dan dapat mencapai 185 mm/hari.

Jumlah penduduk Bandar Lampung pada tahun 1912 hanya 18.753 jiwa(Sobirin 2001), hanya dalam kurun waktu 92 tahun pada tahun 2004 berkembang hampir 48 kali lipat mendekati 900.000 jiwa.

Pertumbuhan tinggi tersebut utamanya disebabkan antara lain karena migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Provinsi Lampung sebagai daerah penerima transmigran. Sampai dengan tahun 2004, jumlah penduduk telah mencapai 792.142 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 1,96%. Kepadatan absolut penduduk 4.038,03 jiwa/km² (Sumber: Data BPS per Maret 2005)

PENDAHULUAN

Infrastruktur di Kota Bandar Lampung telah cukup lengkap dan tersebar ke berbagai pelosok. Meskipun demikian, dalam beberapa hal infrastruktur belum mencukupi dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, utamanya pada wilayah-wilayah yang relatif terpencil. Di sisi lain, infrastruktur dan fasilitas umum yang telah tersedia memerlukan biaya pemeliharaan yang besar, sehingga pada kondisi keuangan pemerintah saat ini yang terbatas, banyak dijumpai berbagai kerusakan infrastruktur terutama jalan.

Struktur perekonomian Kota Bandar Lampung didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor industri pengolahan tanpa migas, sektor perdagangan, hotel dan restoran, Sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Kontribusi keempat sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung secara berturut-turut pada tahun 2004 adalah 26,63%, 18,71%, 16,64%, dan 15,69%.

Dikaitkan dengan jumlah penduduk, ternyata pertumbuhan PDRB masih dapat melampaui laju pertumbuhan penduduk. Walaupun PDRB per kapita tidak sepenuhnya dapat menggambarkan pendapatan per kapita penduduk, namun dapat dijadikan indikator yang cukup layak untuk menilai apakah pembangunan ekonomi suatu wilayah telah mampu memberikan tingkat capaian kepada masyarakat dalam

PENDAHULUAN

memanfaatkan sumberdaya yang ada. Berdasarkan data PDRB per kapita harga konstan tahun 1993, dapat dinyatakan bahwa walaupun relatif kecil, telah terjadi kenaikan riil pendapatan per kapita penduduk Kota Bandar Lampung.

Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan pendapatan per orang penduduk, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Dengan keterbatasannya indikator PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

1.2. Pembangunan Berkelanjutan

Konsepsi pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan azas pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam visi dan misi Kota Bandar Lampung. Salah satu penegasan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Bandar Lampung adalah berupa salah satu misi ke-11 dari Renstra Kota Bandar Lampung tahun 2001-2005, yaitu ***Menjamin ketersediaan dan terjaganya daya dukung sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup bagi pembangunan kota.***

PENDAHULUAN

Arah Kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup daerah Kota Bandar Lampung adalah (1) pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (2) pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam ruang yang tertata secara baik. Untuk kebutuhan tersebut, penyiapan rencana tata ruang wilayah diharapkan dapat mengakomodasikan berbagai perubahan dan perkembangan di wilayah Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

Perkembangan pembangunan yang digerakkan oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat, sebagian dilakukan dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi sebagai terobosan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta persiapan meng-

PENDAHULUAN

hadapi era globalisasi. Perkembangan lainnya diformulasikan sebagai kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada wilayah perdesaan dan pertanian melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pembangunan sosial ekonomi budaya adalah dengan meningkatkan kesatuan masyarakat di Kota Bandar Lampung yang berciri multi etnis dalam suatu keserasian yang harmonis. Salah satu bentuk operasionalisasi kebijakan pembangunan adalah reorientasi pembangunan ekonomi kerakyatan dengan sektor pertanian sebagai unggulan yang tidak terlalu tergantung dari bahan baku impor, dengan tetap berorientasi pada pasar domestik dan internasional. Pembangunan ekonomi skala besar yang sudah ada diarahkan sebesar mungkin kepada pola kemitraan yang sinergik, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan mengembangkan kepedulian yang tinggi dari pengusaha besar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha kecil dan pengusaha menengah serta koperasi.

1.3. Isu-Isu Lingkungan Hidup

Adapun isu lingkungan hidup dan tata ruang yang berkembang di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Rusaknya ekosistem di kawasan pantai Teluk Lampung

Pencemaran laut sudah sering terjadi di Teluk Lampung. Sumber pencemar di Teluk Lampung dapat berasal dari berbagai aktivitas di

PENDAHULUAN

pelabuhan Panjang, limbah kapal nelayan, limbah domestik, perhotelan, pasar, serta limbah cair dan padat berbagai industri di Bandar Lampung. Limbah domestik umumnya berupa limbah padat, seperti plastik, kardus, kertas, potongan



kayu, dan limbah organik lainnya. Limbah domestik ini masuk ke Teluk Lampung melalui sungai terutama pada musim hujan, yaitu Way Galih, Way Ambon, Way Pidada, Way Lunik, Way Kuala, Way Kunyit, Way Kupang, dan Way Belau. Limbah padat yang terbawa sungai-sungai tersebut setelah masuk ke Teluk Lampung, sebagian menjadi tumpukan sampah di sepanjang pantai. Hal ini dapat dilihat sepanjang pantai mulai dari Kelurahan Way Lunik sampai Kotakarang, Telukbetung

Merupakan suatu fakta, pembangunan gedung, industri di wilayah pesisir Teluk Lampung (di daerah Sukaraja dan Kota karang) sudah tidak mentaati garis sempadan pantai yang diawali dengan melakukan penimbunan pantai dengan tanah yang diambil dari bukit atau gunung yang ada di daerah Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan atas izin atau kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang sudah dimulai dilakukan sejak tahun 1980. Padahal diketahui bahwa

PENDAHULUAN

kesinambungan perkembangan dan kelestarian kawasan pantai sangat penting untuk menghindari terjadinya bencana alam seperti badai/tsunami lebih-lebih Lampung merupakan daerah patahan bumi seharusnya batas garis sempadan pantai ditaati. Bila mengikuti standar internasional sejauh 2 mil/3,4 km dari garis pantai terluar atau titik surut terjauh hingga kearah daratan atau standar nasional adalah 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat, dan di daerah areal tersebut tidak boleh dilakukan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung.

Penimbunan wilayah pesisir selain memiliki dampak terhadap pencemaran laut dan merusak biota laut serta terumbu karang terutama karena sedimentasi, tentunya berdampak bagi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada laut terutama dilihat dari

b. Rusaknya daerah tangkapan air

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) seluas 22.249,31 hektar, memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. (UPTD Tahura WAR, 2000).

Hingga saat ini pengelolaan



Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman masih berada di bawah pemerintah Propinsi Lampung, akibatnya Pemerintah Kota Bandar Lampung seringkali mengalami kendala dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh aktifitas yang terjadi di Tahura Wan Abdul Rachman. Pengaruh keberadaan Tahura Wan Abdul Rachman baik fisik maupun biologi sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar Tahura. Tingginya pertumbuhan penduduk, sempitnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia memicu pembukaan lahan baru. Pembukaan lahan tersebut sering kali tidak memperhatikan peruntukan suatu wilayah. Rusaknya vegetasi di daerah tangkapan air mengakibatkan hilangnya kemampuan sempadan sungai menahan air hujan. Hal ini mengakibatkan banjir tahunan dengan membawa lapisan tanah subur yang berarti memperluas lahan kritis.

c. Potensi pencemaran udara

Kualitas udara di suatu lokasi atau wilayah dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran di lapangan. Banyaknya paramater yang diukur tergantung pada jenis peralatan, tenaga, waktu, dan biaya yang tersedia. Umum-



PENDAHULUAN

nya parameter kualitas udara yang diukur adalah sulfur dioksida, hidrogen sulfida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, ammonia, hidrokarbon, timah hitam, debu, dan bising.

Pencemaran lingkungan secara potensial dapat bersumber dari emisi kendaraan bermotor, emisi gas dan debu pada industri pengolahan. Meningkatnya Emisi kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung diakibatkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sehingga pada jam-jam sibuk terjadi kemacetan lalu lintas. Data hasil pengukuran lapangan menunjukkan bahwa lokasi yang padat lalulintasnya dengan kendaraan bermotor memiliki kadar CO yang lebih tinggi dibanding dengan lokasi yang relatif sepi lalulintasnya. Sedangkan emisi gas dan debu pada beberapa industri pengolahan masih berada di bawah ambang batas, namun peningkatan jumlah industri utamanya di sekitar kawasan perkotaan, menunjukkan potensi besar untuk menjadi sumber bahan pencemar.

d. Limbah Industri dan Rumah Sakit

Industri di Kota Bandar Lampung didominasi oleh industri kecil dan rumah tangga yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Limbah industri dapat didefinisikan sebagai suatu hasil buangan berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari proses industri pengolahan maupun non industri pengolahan.

PENDAHULUAN

Limbah dari industri pengolahan ini hanya sebagian kecil yang diproses melalui daur ulang menjadi bahan lain, selebihnya banyak dibuang langsung. Sedangkan sumber limbah padat dari industri non pengolahan yaitu limbah padat yang berasal dari berbagai sektor kegiatan antara lain limbah padat dari sektor domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum.

Limbah padat dan sektor domestik ini banyak dipengaruhi oleh asal-usul sumber limbah padat yang ada terutama di daerah perkotaan berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga). Jumlah limbah padat non-industri yang diproduksi di Kota Bandar Lampung telah mendekati angka 1.000 m³/hari.

Sedangkan Sampah atau limbah dari alat-alat pemeliharaan kesehatan merupakan suatu faktor penting dari sejumlah sampah yang dihasilkan, beberapa diantaranya mahal biaya penanganannya. Namun demikian tidak semua sampah medis berpotensi menular dan berbahaya. Sejumlah sampah yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas medis hampir serupa dengan sampah domestik atau sampah kota pada umumnya. Pemilahan sampah di sumber merupakan hal yang

PENDAHULUAN

paling tepat dilakukan agar potensi penularan penyakit dan berbahaya dari sampah yang umum.

Sampah yang secara potensial menularkan penyakit memerlukan penanganan dan pembuangan, dan beberapa teknologi non-insinerator mampu mendisinfeksi sampah medis ini. Teknologi-teknologi ini biasanya lebih murah, secara teknis tidak rumit dan rendah pencemarannya bila dibandingkan dengan insinerator.

Banyak jenis sampah yang secara kimia berbahaya, termasuk obat-obatan, yang dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Sampah-sampah tersebut tidak sesuai diinsinerasi. Beberapa, seperti merkuri, harus dihilangkan dengan cara merubah pembelian bahan-bahan; bahan lainnya dapat didaur-ulang; selebihnya harus dikumpulkan dengan hati-hati dan dikembalikan ke pabriknya.

Sampah hasil proses industri biasanya tidak terlalu banyak variasinya seperti sampah domestik atau medis, tetapi kebanyakan merupakan sampah yang berbahaya secara kimia.

e. Penggerusan Bukit

Aktivitas pertambangan (terutama galian C) cukup potensial menjadi sumber degradasi lingkungan di Kota bandar Lampung, seperti penggalian batu dan pasir, yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan

peningkatan erosi tanah. Sebagian besar penggalian batu-batu diambil dari gunung-gunung yang berada di Kota Bandar Lampung, antara lain gunung camang, gunung kunyit, gunung sulah, dan gunung perahu. Kegunaan galian batuan tersebut salah satunya adalah untuk reklamasi pantai teluk



Lampung. Penggerusan gunung-gunung yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak terganggunya ekosistem fauna dan flora di sekitar gunung tersebut.

f. Bencana banjir akibat banyaknya sampah dan sedimen pada gorong-gorong dan drainase

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia.

Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan



PENDAHULUAN

sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat.

Persoalan pencemaran lingkungan tidak saja 'menyangkut' sampah yang tidak terangkut sebagaimana yang diuraikan tetapi juga sampah yang bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang tidak terangkut oleh Truk pengangkut sampah akan menimbulkan penumpukan di beberapa lokasi di Kota Bandar Lampung, sehingga apabila datang musim penghujan sampah tersebut akan terbawa oleh air ke dalam parit/selokan menuju aliran drainase. Seiring dengan berjalannya waktu, maka sampah tersebut akan menghambat laju aliran air dan berdampak pendangkalan parit/selokan, sehingga pada musim penghujan tiba terjadi banjir.

g. Lemahnya *Low enforcement*

Peraturan perundangan mengenai AMDAL di Indonesia sudah cukup baik, hanya saja dalam pelaksanaannya seringkali mengalami benturan-bentura sehingga dokumen AMDAL yang telah dibuat tersebut tidak efektif dalam tujuannya untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Penilaian AMDAL yang saat ini dilakukan tidak kondusif bagi tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut

PENDAHULUAN

diperburuk oleh rendahnya derajat komitmen dan dukungan para pengambil keputusan di kalangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk instansi pemberi izin/penanggung jawab mengenai signifikansi AMDAL dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga *low enforcement* sangat rendah.

Keterbatasan perangkat AMDAL ini ditambah lagi dengan tidak diaturnya pengawasan setelah pemberian ijin operasi suatu rencana kegiatan serta kurangnya tenaga baik di pusat maupun daerah untuk secara teratur mengadakan audit lingkungan.

Untuk meningkatkan derajat penegakan Amdal, maka mekanisme penegakan RKL dan RPL sangat penting untuk dijabarkan dalam sebuah peraturan hukum. Sistem pengawasan empat lapis harus diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan sistem perizinan. Keempat lapis itu adalah Pengawasan mandiri (self monitoring), pengawasan peraturan oleh departemen sektoral dan pemerintah daerah, pengawasan pentaatan, dan pengawasan publik.

h. Rendahnya kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kelemahan dari peran serta masyarakat menurut Canter (1977) termasuk kebingungan masyarakat akan isu yang ditelaah, semenjak banyak perspektif baru akan diketengahkan. Hasil peran serta yang

PENDAHULUAN

belum menentu, resiko kemungkinan penundaan proyek bahkan peningkatan biaya (cost) dari proyek tersebut.

Masalah utamanya adalah kecenderungan masyarakat untuk kehilangan gairah selama masa pengembangan proyek yang cukup lama. Masyarakat, berbeda dengan kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, tidak dapat terus-menerus melakukan kegiatan secara aktif dalam periode yang lama. Karena itu, jika peran serta masyarakat tidak secara hati-hati dilakukan, itu akan menimbulkan perasaan skeptis diantara masyarakat ketimbang memberikan informasi yang berguna bagi mereka. Masyarakat akan berpikir bahwa para petugas tidak mampu, tidak jujur atau hanya bersikap terlalu teknis. Sejalan dengan itu, para petugas juga merasa masyarakat tidak mampu diberi informasi lagi, tidak mau bekerja sama dan semata-mata hendak mengacaukan kemajuan yang akan dicapai.

Juga akan sulit untuk menentukan siapa yang akan jadi wakil masyarakat dalam proses. Keberhasilan untuk menentukan "masyarakat" yang tepat sangat tergantung akan desain program "penyertaan". Dengar pendapat misalnya, karena hanya mereka yang vokal dan terorganisir dengan baik yang dapat menyampaikan pendapatnya

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai kekuatan sosial yang luar biasa, belum mampu diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah. Mestinya sebagai kekuatan dasar, pemerintah bisa melakukan hal tersebut. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang coba dibangun oleh pemerintah sarat dengan orientasi proyek. Tidak heran bila bentuk pemberdayaan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pemberdayaan semu, bukan pemberdayaan yang sejati. Karena landasan peran serta masyarakat adalah proyek, maka tingkat partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan sangat kecil.

Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara substansi menggambarkan bahwa apabila semua pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka penurunan kualitas lingkungan hidup akan dapat di kurangi. Mengacu pada konsepsi tersebut maka rumusan rencana pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pokok-pokok kebijaksanaan yang strategis yang diwujudkan melalui pembangunan tahunan yang didasarkan pada rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bandar Lampung tahun 2005 bertujuan untuk :

PENDAHULUAN

1. **Menyediakan fondasi** yang handal berupa data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup daerah.
2. **Meningkatkan mutu informasi** tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. **Menyediakan sumber informasi utama** bagi REPETADA, PROPEDA, dan investor.
4. **Menyediakan informasi** lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*good environmental governance*) di daerah; sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan Kota Bandar Lampung tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota secara keseluruhan, tapi juga diarahkan bagi perwujudan kepentingan berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang yang berbeda serta bagi generasi mendatang. Untuk itu, maka pembangunan kota Bandar Lampung harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat kota. Dengan demikian segenap pelaku pembangunan harus berperan serta, dan saling menguatkan demi tercapainya kinerja kota yang optimal.

Pemanfaatan sumber daya kota hendaknya dapat dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meningkatkan produktifitas perkotaan dalam rangka pengembangan ekonomi kota sehingga tetap terpeliharanya kelangsungan pembangunan kota Bandar Lampung secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Kota Bandar Lampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan (Stakeholder) melalui mobilisasi daya yang dimiliki

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

guna mewujudkan kemakmuran, keadilan sosial, dan peningkatan peran Kota Bandar Lampung secara fungsional dalam pengembangan wilayah provinsi dan nasional.

1. Visi Pembangunan Kota Bandar Lampung

Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat Kota Bandar Lampung melalui pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan pada tahun 2005.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi Kota Bandar Lampung pada tahun 2005, maka misi yang akan ditempuh adalah :

- a. Mengembangkan kondisi kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur, bertanggung jawab, dan partisipatif.
- c. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.
- d. Melestarikan serta mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang bernilai tinggi.
- e. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- f. Menciptakan keamanan dan ketertiban kota.

- g. Meningkatkan pembangunan perekonomian.
- h. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan masyarakat.
- i. Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan yang berkualitas sesuai dengan tata ruang.
- j. Mengembangkan kehidupan sosial politik yang dinamis dan demokratis.
- k. Mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
- l. Meningkatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam pemberantasan penyakit sosial masyarakat.

2.2. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih terpadu dan terarah, agar sumberdaya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, secara berkesinambungan melalui tindakan atau kegiatan yang terprogram dalam kurun waktu tertentu baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, dengan konsekwensi terjadinya pergeseran-pergeseran keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga untuk menghindari diperlukan upaya pengendalian lingkungan guna menekan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat merugikan.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam dan mendukung kelestarian lingkungan upaya lintas bidang yang perlu dilakukan meliputi :

- Pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- Penumbuhan tanggung jawab sosial melalui pendidikan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- Penataan kelembagaan dan penegakan hukum.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kerangka tersebut melaksanakan pembangunan dengan sebaik-baiknya melalui penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang yang penuh tantangan, dengan penetapan tujuan yang jelas dengan memperhatikan tantangan, kendala, peluang dan potensi yang dimiliki serta faktor internal dan eksternal, selanjutnya diformulasikan dalam **Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2001 - 2005 dan Pola Dasar pembangunan kota Bandar Lampung tahun 2001 - 2005.**

Yang memuat rencana lima tahunan dengan menggambarkan Visi, Misi Strategis, Program dan kegiatan pembangunan daerah

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

pemerintah kota Bandar Lampung yang merupakan penjabaran aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai satu kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Secara garis besar otonomi daerah bidang pengelolaan lingkungan berarti :
 - Menyesuaikan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dengan ekosistem setempat.
 - Menghormati kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari.
 - Tidak berdasarkan batas administratif tetapi berdasarkan batas ekologi.
 - Meningkatkan kemampuan daya dukung lingkungan setempat dan bukan menghancurkan daya dukung ekosistem dengan eksploitasi yang melewati daya dukung.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

- Pelibatan secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan (menentukan) dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Adapun Kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup guna meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup adalah :
- Menggalang kerjasama dengan LSM lingkungan dan pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan hidup.
 - Melakukan penindakan secara tegas terhadap pencemaran lingkungan dengan tuntas melalui penegakan supremasi hukum.
 - Membuka peluang bagi aksesibilitas informasi kepada masyarakat melalui neraca lingkungan sumber daya alam.
 - Melakukan penertiban terhadap pelanggar ketentuan penataan ruang yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan
 - Membuat kebijakan atas pencadangan lahan sebesar 30 % bagi ruang terbuka hijau.
 - Melakukan penataan lokasi industri yang berpotensi mencemari lingkungan pada wilayah-wilayah pinggiran kota (Fringe area)

- Menata kembali fungsi hutan kota sebagai paru-paru kota secara legal dan persuasif.

2.3. Kebijakan Tata Ruang

Sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan berkembang termasuk didalamnya kegiatan industri di Kota Bandar Lampung, maka disediakan ruang sesuai dengan potensi serta masalah pengembangan tata ruang kota. Pengembangan tata ruang kota dilaksanakan secara stimulasi dan pengarahan lokasi bagi kawasan-kawasan kota yang belum terbangun, relokasi bagi penggunaan yang dipandang tidak sesuai, refungsionalisasi dan rehabilitasi bagi penggunaan ruang menurut fungsinya dan konservasi pada bagian-bagian kawasan kota yang dijaga kelestariannya.

Secara administratif penataan ruang Kota Bandar Lampung diatur dalam peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005 - 2015. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, Kota Bandar Lampung dibagi dalam 8 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu :

1. BWK A Gedong Meneng, sebagai daerah pusat perumahan skala kecil, pusat pendidikan tinggi, dan kebudayaan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

2. BWK B Sukarame, sebagai daerah pusat perumahan skala besar, industri kecil, cadangan pengembangan, dan pusat pelayanan lokal.
3. BWK C Panjang, sebagai daerah pusat pelabuhan samudera, pergudangan, terminal barang, dan industri pengolahan.
4. BWK D Sukabumi/Tanjung Karang Timur, sebagai daerah pusat perdagangan/jasa dan perumahan.
5. BWK E Tanjung Karang/Pusat Kota, sebagai daerah pusat perdagangan umum dan jasa umum.
6. BWK F Tanjung Karang Barat, sebagai daerah pusat perdagangan/jasa dan perumahan.
7. BWK G Langkapura, sebagai daerah pengembangan hortikultura, kawasan konservasi, dan perumahan kavling besar dengan KBD kecil.
8. BWK H Teluk Betung, sebagai daerah pusat pemerintahan, perdagangan grosir, dan pariwisata pantai.

2.4. Kebijakan Sosial Ekonomi Dan Budaya

Penduduk Kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Palembang dan lain-lain serta Lampung sebagai penduduk asli. Hubungan sosial diantara masyarakat yang heterogen tersebut cukup baik apalagi ditunjang dengan tingkat pendidikan

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

penduduk yang relatif tinggi merupakan modal dasar yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain perangkat formal ditengah-tengah masyarakat seperti kelurahan termasuk LKMD, RT dan RW, umumnya terdapat Lembaga lain yang cukup berperan seperti perkumpulan keluarga, pengajian, arisan dan lain-lain, serta tokoh informal yang menjadi teladan masyarakat yang heterogen tersebut. Mayoritas pekerjaan penduduk Kota Bandar Lampung bergerak dibidang perdagangan, jasa-jasa, industri dan pegawai negeri sipil.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian, pemerintah kota Bandar Lampung mengambil kebijakan dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang bangunan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas bangunan di wilayah kota Bandar Lampung, yang meliputi berbagai bidang termasuk bidang pembangunan permukiman yang sehat, tata lingkungan, konstruksi bangunan, arsitektur dan hubungannya dengan jenis bangunan lainnya dalam Peraturan Daerah ini juga diatur agar setiap pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan agar menyiapkan dokumen Amdal serta UKL dan UPL sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dan izin usaha.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Disamping itu juga dalam setiap penerbitan izin mendirikan bangunan, pemerintah kota Bandar Lampung mempersyaratkan juga agar dapat membuat sumur resapan air yang berguna bagi kesinambungan siklus air tanah, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan usaha-usaha yang lebih optimal.

Disamping membuat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1997 pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1990 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Kebijakan ini meliputi kewajiban setiap warga masyarakat termasuk kalangan pengusaha dan swasta untuk memelihara ketertiban, keamanan dan keapikan di wilayah Kota Bandar Lampung. Disamping itu juga memuat tentang larangan membuang sampah bukan pada tempatnya, termasuk mengotori serta merusak taman kota dan hutan kota yang ada di Kota Bandar Lampung.

Dengan adanya kebijakan ini disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan agar dampak pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung terhadap lingkungan hidup dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB III

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

3.1. Konsep Dasar Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan berdasarkan pada pendekatan Tekanan-Kondisi-Respon atau *Pressure-State-Response* (PSR) (Kementrian Lingkungan Hidup, 2003). Dalam pendekatan ini, tiga komponen utama yaitu kegiatan manusia dan dampaknya, kondisi lingkungan, serta respon institusi dan individu, digambarkan saling berinteraksi dan memberikan pengaruh antar satu komponen dengan komponen lainnya. Dengan mencermati pola interaksi antar komponen tersebut, dapat dilakukan eksplorasi mendalam dan menyeluruh mengenai kondisi lingkungan, penyebab perubahan kondisi, serta instrumen yang dapat mengontrol perubahan kondisi lingkungan tersebut. Pada gilirannya, secara lebih konkrit eksplorasi tersebut akan bermuara pada analisis dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang bersifat komprehensif.

Beberapa sub-komponen penyusun dari ketiga komponen utama dalam pendekatan PSR adalah sebagai berikut:

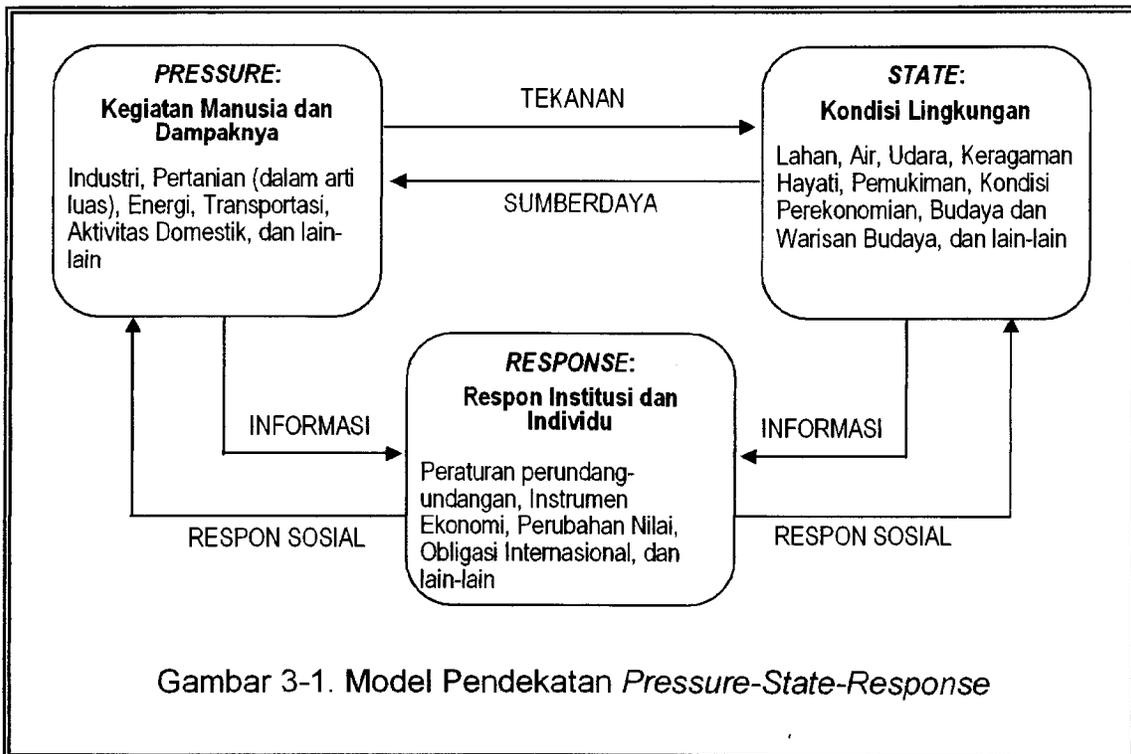
1. Kegiatan Manusia dan Dampaknya (*Pressure*): Industri, Pertanian (dalam arti luas), Energi, Transportasi, Aktivitas

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Domestik, dan lain-lain.

2. Kondisi Lingkungan (*State*): Lahan, Air, Udara, Keragaman Hayati, Pemukiman, Kondisi Perekonomian, Budaya dan Warisan Budaya, dan lain-lain.
3. Respon Institusi dan Individu (*Response*): Peraturan perundang-undangan, Instrumen Ekonomi, Perubahan Nilai, Obligasi Internasional, dan lain-lain.

Secara ringkas komponen utama dan pola interaksinya dalam pendekatan PSR, disajikan pada Gambar 3-1.



Dalam Laporan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD)

Kota Bandar Lampung Tahun 2005 ini, komponen *state* dan *pressure* disajikan dengan mengacu pada pada Buku II (Basis Data). Adapun komponen *response* disajikan dengan mengacu pada Bab II. Penyajian evaluasi dan analisis kebijakan selanjutnya dilakukan secara komprehensif dan dibagi menjadi komponen Sumberdaya Alam, Sumberdaya Buatan, dan Sumberdaya Manusia. Pada setiap pembagian tersebut telah meliputi gambaran mengenai kegiatan manusia yang menimbulkan tekanan lingkungan, kondisi lingkungan eksisting, dan kebijakan penanggulangan kerusakan lingkungan.

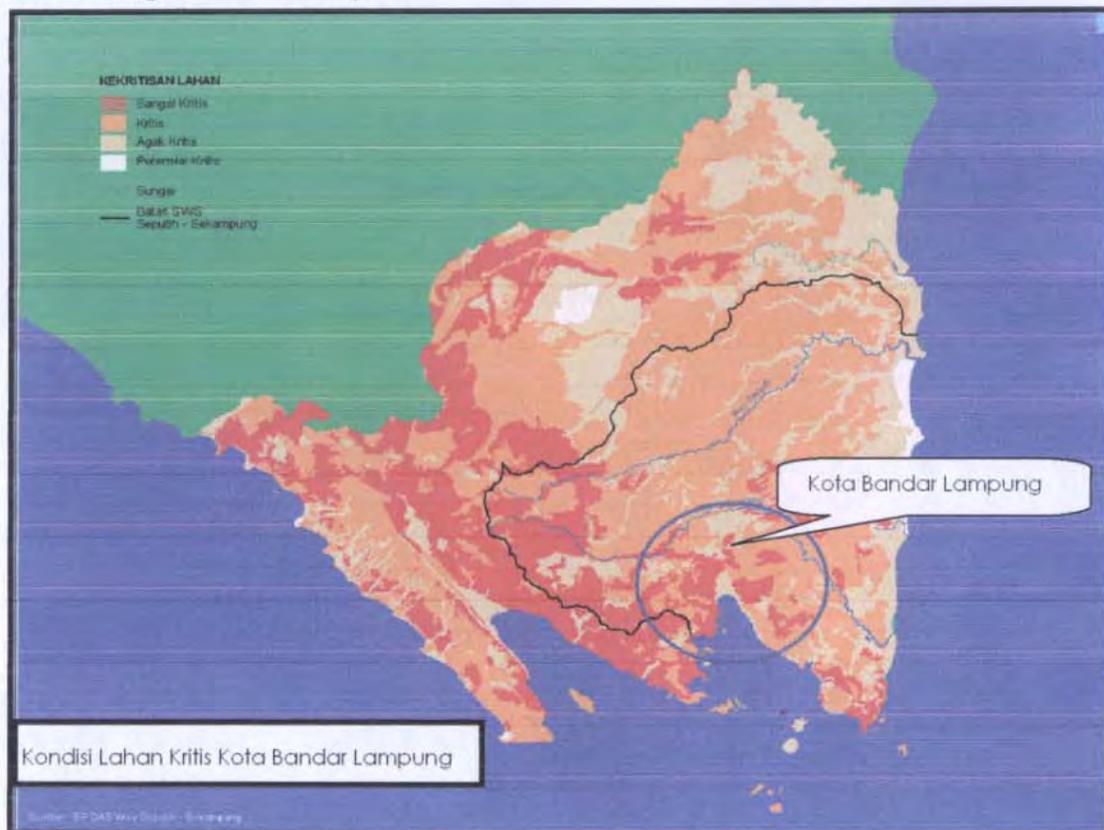
3.2. Sumberdaya Alam

3.2.1. Sumberdaya Lahan

Luas wilayah Kota Bandar Lampung yang mencapai 192,18 km², merupakan stok total bersifat tetap yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membutuhkan lahan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tabel SDA-1 sampai dengan SDA-2 telah disajikan gambaran mengenai penggunaan lahan yang mencerminkan tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan. Kebutuhan untuk aktivitas pertanian dan pemukiman telah bertambah secara signifikan pada semua wilayah kabupaten/kota.

Penggunaan lahan yang terbesar di Propinsi Lampung adalah kawasan pertanian yang mencapai 10.470,01 ha, namun kawasan ini telah mengalami pergeseran penggunaan lahan secara umum disebabkan oleh ekstensifikasi dan introduksi kawasan budidaya.

Sampai saat ini, ekstensifikasi dan introduksi kawasan budidaya umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kerusakan sumberdaya lahan, pada gilirannya juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk peta kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertanian dan pedesaan, akan sangat sulit tercapai.



Sumber : BPDAS Way Seputih - Sekampung

Menilik pada kondisi dan penyebab kerusakan sumberdaya lahan, maka respon harus diberikan secara proporsional dan cepat. Penataan ruang harus dijadikan instrumen handal sebagai pengendali dan pemulih kerusakan sumberdaya lahan. Penataan ruang harus diimplementasikan secara mantap dengan didukung oleh instrumen perijinan penguasaan dan penggunaan lahan yang melibatkan berbagai instansi yang berkompeten seperti BPN dan Kehutanan, dan didukung oleh instansi teknis lainnya seperti Perkebunan, Pertambangan, dan Pertanian.

Secara lebih makro, kebijakan penggunaan lahan harus dilakukan melalui distribusi penggunaan lahan yang sesuai dengan daya dukungnya. Secara umum jenis tanah di Kota Bandar Lampung termasuk jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut, proses pembentukannya dipengaruhi oleh curah hujan yang cukup tinggi dan pengaruh vegetasi hujan tropis. Sebagian besar jenis tanah pada topografi datar (kemiringan lereng 0-5%) mempunyai kemampuan daya dukung yang cukup baik, meliputi areal yang cukup luas terutama di bagian tengah dan timur.

3.2.2. Sumberdaya Hutan

Sumberdaya hutan sangat potensial dalam menopang pembangunan, menghasilkan produk ganda berupa barang dan jasa.

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Produk barang yang dapat diambil dari hutan berupa komoditas kayu dan non kayu. Sedangkan produk jasa berupa pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir, penstabil iklim, dan pengembangan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 408/KPTS/11/1993 tanggal 10 Agustus 1993 telah ditetapkan kawasan hutan lindung (KHL) Gunung Betung Reg. 19 sebagai Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (TAHUNA WAR) seluas 22.249,31 Ha (sesuai hasil tata batas).

Adapun luas dan fungsi hutan kota di Kota Bandar Lampung berdasarkan SK Menhutbun Nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan hasil tata batas kawasan hutan sebagai berikut :

No.	Nama Kawasan	Nomor Register	Fungsi dan Luas Hutan (Ha)		Keterangan
			TN/Suaka	HL	
1	TAHURA WAR	Reg. 19	300	-	22.249,31
2	Batu Serampok	Reg. 17	-	100	7.230**
Jumlah			300	100	

Keterangan : **) = Sudah di tata Batas

Sedangkan Kota Bandar Lampung memiliki hutan kota seluas 9 Ha yang terletak di kelurahan way dadi Kecamatan Sukarame namun hutan kota tersebut telah mengalami kerusakan sebesar 40 % (sumber Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota). Hal ini diakibatkan kurang

sadarnya masyarakat akan pentingnya fungsi hutan yang mana fungsi hutan antara lain sebagai pengatur tata air, pengawetan plasma nutfah, sumber keanekaragaman hayati, pariwisata, penelitian dan rekreasi.

Untuk tipe vegetasi pada umumnya merupakan hutan sekunder jenis vegetasi alami terdesak oleh vegetasi budaya. Masih terdapat 72 jenis vegetasi liar yang ada didalam kawasan hutan, namun keberadaan sudah mulai jarang, sedangkan jenis vegetasi yang dibudidayakan oleh masyarakat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar antara lain, kopi, durian, alpokat, tangkil dan petai.

Kerusakan hutan di Kota Bandar Lampung telah menyebabkan dampak turunan berupa peningkatan erosi, banjir, tanah longsor, penurunan kualitas badan air, dan pendangkalan saluran drainase dan sungai.

Menyadari kondisi kerusakan hutan dan pentingnya fungsi lindung hutan, maka seharusnya segera diimplementasikan berbagai kebijakan di bidang sumberdaya hutan dan lingkungan. Kebijakan yang dapat ditempuh yang meliputi rehabilitasi kerusakan hutan, mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut, dan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kawasan hutan.

Upaya penghijauan dan reboisasi, ditujukan untuk menurunkan

erosi dan sedimentasi, pengendalian banjir dan kekeringan, meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani di daerah kritis, serta mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan. Selain itu dilakukan pula program rehabilitasi lahan kritis yang ditujukan untuk meningkatkan sumber mata pencarian baru di daerah kritis.

Sasaran kegiatan dalam program rehabilitasi lahan kritis antara lain adalah rehabilitasi lahan kritis di areal pertanian tanah kering (untuk penghijauan) pada kawasan budi daya dan rehabilitasi lahan kritis di areal kawasan lindung, melalui program reboisasi serta kegiatan percontohan rehabilitasi lahan kritis pada lokasi ex galian C.

Penghijauan dan reboisasi dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif. Manfaat kegiatan tersebut setidaknya bagi masyarakat setempat, dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didalamnya mencakup peningkatan sumberdaya manusia dan peranserta masyarakat sebagai faktor utama. Pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuh kembangkan melalui penyuluhan, penerangan dan pendidikan, pemberian stimulasi/insentif, penegakan hukum yang disertai dengan dorongan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi nasional.

Penghijauan dan Reboisasi ditujukan untuk meningkatkan mutu dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), ketersediaan sumberdaya baru untuk pembangunan di daerah, kesempatan berusaha dan bekerja bagi masyarakat di daerah kritis serta meningkatkan fungsi hidro-orologis dan daya dukung lingkungan.

Pengelolaan hutan juga dilakukan melalui pengembangan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Menekan laju kerusakan dan kepunahan sumberdaya alam hayati dan ekosistem dengan menerapkan pola pendekatan sosial, meningkatkan upaya perlindungan, memberdayakan dan pengamanan, serta penegakan hukum.
- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan taman hutan raya.
- Menyajikan data dan informasi yang akurat serta melakukan upaya promosi potensi sumberdaya alam dan obyek wisata alam yang mampu menarik minat investasi dan pengunjung.
- Memantapkan dan meningkatkan organisasi pengelola taman nasional.
- Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem pembentukan Taman hutan raya yang mampu meningkatkan kepedulian, peranserta dan kesejahteraan

masyarakat sekitar.

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga baik swasta maupun masyarakat. Dalam rangka mengintegritaskan pengelolaan taman hutan raya dengan pembangunan daerah dan sektor terkait.
- Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung pengelolaan.

Untuk menuntaskan masalah kehutanan yang sangat kompleks dan selalu muncul, kemudian mereda dan ada kemungkinan bertambah lagi maka peranserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan, karena hutan merupakan sumberdaya alam yang sangat bernilai bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Perambahan dikawasan hutan terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, akibat beribu-ribu hektar hutan gundul dan beralih fungsi. Hal ini terjadi karena desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya dan tidak adanya lahan pertanian yang dimiliki.

Di sisi lain, perlu dilakukan pemberdayaan lembaga dan hukum adat untuk menjaga kelestarian hutan. Jika lembaga-lembaga adat yang ada bersatu dan membuat aturan-aturan dalam menangani masalah-masalah hutan, damar dan sumberdaya alam lainnya, maka

sumberdaya alam akan tetap lestari dan memberikan kontribusi peningkatan penghasilan masyarakat di wilayah tersebut.

3.2.3. Sumberdaya Air

Air merupakan sumberdaya yang mutlak dibutuhkan untuk kehidupan dan aktivitasnya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air bersih dengan jumlah penduduk dan tingkat permintaannya membutuhkan suatu kearifan dalam penggunaan sumberdaya alam tersebut. Secara alami, sumberdaya air termasuk sumberdaya yang dapat diperbaharui, namun dalam kasus-kasus tertentu sumberdaya ini mengalami perubahan potensi menjadi sumberdaya alam tak terbaharui. Berdasarkan pada letak/ posisinya sumberdaya air dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: air permukaan, air tanah, dan air udara (atmosfer).

Sebagai salah satu sumberdaya alam keberadaan air di daratan baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh komponen lingkungan lainnya. Dari segi kuantitas, air sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi, keadaan fisik serta penggunaan lahan dari suatu wilayah. Untuk air tanah sendiri, jenis dan ketebalan dari aquifer pada wilayah tersebut dan porositas tanah, merupakan faktor yang menentukan kualitas air tanah.

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas DAS (Ha)	Debit (m ³ /dt)	Muara
14	Way Langkapura	8	393	t.a	-
15	Way Sukamaju	9,25	1.730	t.a	Teluk Lampung
16	Way Keteguhan	5	280	t.a	Teluk Lampung
17	Way Simpang Kanan	6	1.695	t.a	-
18	Way Simpang Kiri	9,5	1.490	t.a	-
19	Way Betung	14	3.490	t.a	Teluk Lampung
20	Way Gading	t.a	t.a	t.a	Way Penengahan
21	Way Kedaton	t.a	t.a	t.a	Way Kandis
22	Way Kandis	t.a	t.a	t.a	Way Kandis
23	Way Primus	t.a	t.a	t.a	-
24	Way Limus	t.a	t.a	t.a	Way Kandis
25	Way Batu Lengguh	t.a	t.a	t.a	Way Kandis

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung (2003)
Hasil Analisis (2004)

Air Bawah Tanah

Berdasarkan bentuk morfologi mandala air tanah dapat dibedakan atas 5 (lima) zona sebagai berikut :

1. *Mandala air tanah dataran.*

Muka air tanah ini biasanya berkedalaman minimum 0,6 meter dibawah muka tanah setempat. Kemiringan medan $\pm 5^\circ$ dan ketinggian < 50 M. dpi.

2. *Mandala air tanah pegunungan.*

Ketinggian >50 - 260 M. dpi, pada umumnya muka air tanah berkedalaman ± 20 M. di bawah muka tanah setempat.

3. *Mandala air tanah perbukitan bergelombang lemah.*

Kemiringan medan sekitar 5 - 20°, ketinggian > 0 - 100 M. dpi. muka air tanah beragam ± 10 M di bawah muka tanah setempat.

4. *Mandala air tanah perbukitan bergelombang kuat*

Kemiringan medan $> 20^\circ$, ketinggian $> 100 - 1200$ M dpl Aliran air permukaan biasanya lebih dominan dibanding peresapan. Oleh karenanya kandungan air tanah di wilayah ini digolongkan langka kecuali di daerah lembah dengan air tanah yang terhalus.

5. *Mandala air tanah kerucut gunung api.*

Muka air tanah pada mandala ini sangat beragam, bentuk morfologi sandal berperan dalam mengontrol muka air tanah. Muka air tanah di bagian kaki umumnya dangkal.

Perhitungan potensi air tanah didapatkan melalui pendekatan jumlah dan kapasitas produksi sumur bor dan curah hujan di Kota Bandar Lampung. Diasumsikan bahwa rata-rata kapasitas produksi sumur bor 10 liter/detik, dan merupakan 25% dari *inflow* air tanah. Selain itu juga diperhitungkan konsumsi penduduk pengguna air tanah dangkal (sumur gali), dan laju *inflow* air hujan menjadi air tanah sebesar 10%.

Air Udara

Air udara merupakan air yang berada di atmosfer dalam bentuk uap air. Potensi air udara sangat sulit diukur dan bersifat sangat dinamis.

Selain itu, bentuk air ini sangat berkaitan erat dengan air permukaan dan air tanah, dimana saat air udara cukup terkonsentrasi maka akan menjadi curah hujan. Selanjutnya curah hujan yang sampai ke permukaan tanah akan berubah menjadi air permukaan dan atau masuk (infiltrasi dan perkolasi) ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Oleh karena itu, komponen air udara tidak dimasukkan dalam perhitungan neraca sumberdaya air. Namun demikian potensi air udara tetap dihitung berdasarkan data curah hujan rata-rata.

Pemanfaatan Sumberdaya Air

Pemanfaatan sumberdaya air di Propinsi Lampung meliputi kebutuhan domestik penduduk, industri, pertanian, dan penggunaan lainnya. Secara kuantitas, kebutuhan air masih dapat dipenuhi dari cadangan yang ada. Namun demikian, kebutuhan air sangat ditentukan juga oleh kualitas air yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya air harus dapat mempertahankan kuantitas dan sekaligus kualitas air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya air akan berkaitan erat dengan pengelolaan sumberdaya hutan, karena keberadaan sumber-sumber air permukaan dan air tanah sangat ditentukan oleh kelestarian sumberdaya hutan. Selain itu, pengelolaan kualitas air sangat berkaitan erat dengan sumberdaya buatan utamanya keberadaan industri dan

aktivitas domestik. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan sekaligus menjadi kunci bagi pengelolaan sumberdaya air. Adapun pengelolaan kualitas air utamanya air permukaan sangat berhubungan erat dengan keberadaan sumberdaya buatan (aktivitas industri) sebagai penghasil limbah. Kebijakan pengelolaan kualitas air akan disajikan lengkap pada bagian pengelolaan sumberdaya buatan (industri).

3.2.4. Sumberdaya Mineral

Sumberdaya mineral yang telah dimanfaatkan di Kota Bandar Lampung baru terbatas pada galian golongan C (bahan industri dan konstruksi). Eksploitasi yang telah dilakukan masih berada di bawah potensi cadangan mineral, sebagaimana disajikan pada Tabel SDA-6.

Bahan Galian Kota Bandar Lampung termasuk dalam kategori bahan galian golongan C karena sebagian tanah urug dan batu putih berdasarkan Perda Nomor 01 tahun 1996 jumlah Bukit/Gunung dan Lereng yang ada diwilayah Kota Bandar Lampung. Terdiri dari 16 buah bukit, 16 buah gunung dan 8 buah lereng sedangkan bukit dan gunung yang diizinkan untuk dikelola/ditambang ada 7 buah.

Dari data tahun 2003 tercatat 6 buah tambang batu hitam dengan luas areal 16,75 Ha dengan kapasitas produksinya 1.290 m³/bulan batu putih dengan luas areal 1 Ha, dengan kapasitas

produksinya 100 m³/bulan serta 6 buah tambang tanah urug luas areal 14 Ha. Dengan kapasitas produksinya 3.975 m³/bulan.

Pengelolaan sumber daya alam khususnya bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan, tentunya harus dilakukan secara cermat, rasional bijaksana dan berwawasan lingkungan, oleh karena itu kegiatan ini harus menjadi perhatian karena sangat berpotensi besar untuk merusak lingkungan, dimana kegiatannya merubah bentang alam. Pengelolaan



sumberdaya mineral akan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya yang meliputi sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya lahan. Aktivitas pertambangan (terutama galian C) cukup potensial menjadi sumber degradasi lingkungan seperti penggalian batu dan pasir, yang menyebabkan hilangnya vegetasi dan peningkatan erosi tanah. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan cermat yang mencakup mulai dari proses perijinan, pengawasan pelaksanaan penambangan, dan sampai pada reklamasi lahan bekas tambang. Instansi yang berkompeten dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan, yang terkait dengan Dinas Kehutanan dan Bapedalda.

3.2.5. Sumberdaya Udara

Udara merupakan salah satu unsur alam yang pokok bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi terutama manusia. Tanpa udara yang bersih maka manusia akan terganggu terutama keselamatannya yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kualitas udara ambien dari suatu daerah ditentukan oleh daya dukung alam daerah tersebut serta jumlah sumber pencemaran atau beban pencemaran dari sumber yang ada di daerah tersebut. Kualitas udara khususnya di perkotaan merupakan komponen lingkungan yang sangat penting, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat maupun kenyamanan kota.

Sumber pencemaran udara di Kota Bandar Lampung secara umum terdiri dari 2 (dua) sumber utama pencemaran yaitu dari sumber utama yang tidak bergerak dan sumber utama yang



bergerak. Sumber utama yang tidak bergerak antara lain kegiatan industri pengolahan adalah proses aktivitas industri dengan menggunakan teknologi guna menghasilkan barang. Disamping proses produksi yang merupakan sumber pencemaran, kegiatan pembakaran

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

bahan bakar yang dipergunakan untuk proses utilitas industri juga merupakan sumber pencemaran udara.

Kegiatan-kegiatan industri di Kota Bandar Lampung yang menimbulkan pencemaran udara dalam proses produksinya antara lain; industri arang aktif, industri pakan ternak, industri pakan udang, industri pemecah batu, industri tapioka, dan industri pengolahan karet,

Dari hasil pengukuran kualitas udara pada beberapa pabrik tersebut secara keseluruhan dengan parameter yang digunakan menunjukkan bahwa kadar pencemaran udara masih di bawah ambang batas kecuali beberapa pabrik/industri yang melebihi ambang batas/baku mutu terutama pada unsur debu. Polutan debu yang tertinggi pada saat pabrik produksi waktu siang hari dimusim kemarau, untuk mengatasinya telah dilakukan antisipasi melalui berbagai upaya antara lain dilakukan penyiraman pada areal sekitar, hal inipun terjadi karena produksinya pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan kualitas udara pada lokasi pabrik tersebut masih dalam ambang batas baku mutu udara.

Sedangkan sumber pencemar utama dari sumber bergerak adalah kendaraan bermotor dengan polutan berupa karbon monoksida sebesar lebih kurang 60% dan polutan berupa hidrokarbon berkisar lebih kurang 15%.

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota provinsi Lampung merupakan daerah transit dan lalu lintas antar pulau dan antar provinsi memiliki potensi terjadinya pencemaran akibat buangan kendaraan bermotor. Sedangkan beban pencemaran dari transportasi kota masih relatif rendah karena sarana dan prasarana yang cukup memadai baik kualitas jalan maupun kendaraan operasional yang telah dibatasi masa berlakunya izin trayek (izin operasional).



Salah Satu Sumber Pencemaran Udara Bergerak

Pengendalian pencemaran udara adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran udara dari sumber.

Secara umum kondisi kualitas udara di Kota Bandar Lampung masih relatif baik, meskipun demikian upaya pencegahan dan mempertahankan kondisi tersebut melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap industri-industri potensi sumber pencemar tetap dilakukan, dikaitkan pula dengan telah adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.33/0298/ Bapedalda/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pemeriksaan Mutu/Kualitas Udara di Daerah.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan dunia usaha, terutama pada industri-industri yang dalam proses produksinya berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara

Upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan langkah nyata untuk terlaksananya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh berbagai pihak tersebut antara lain :

a. Peran Pemerintah Daerah

- Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Hutan Kota serta penyelamatan jalur hijau di wilayah perkotaan sebagai paru-paru kota.
- Penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan terutama kendaraan angkutan kota dengan pembatasan ijin trayek dan wajib uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah.
- Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada beberapa titik yang rawan polusi akibat kepadatan lalu lintas

sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukannya pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi.

b. Peranserta masyarakat dan mitra lingkungan

- Mendukung program pemerintah melalui peransertanya dalam langkah-langkah sosialisasi dilingkungannya dengan pemahaman dan ketaatannya terhadap kelestarian lingkungan.

3.2.6. Rawa (Lahan Basah)

Rawa-rawa air tawar di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) memiliki kekayaan hayati flora dan fauna yang cukup tinggi, termasuk rawa payau/ mangrove dibagian muara/ pantai. Saat ini kondisi alamnya mulai berubah akibat eksploitasi yang tidak bijaksana, rawa-rawa ini telah mengalami penurunan kualitas, baik luas maupun keanekaragaman hayati di dalamnya.

Konservasi sumberdaya alam merupakan bentuk pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Berdasarkan analisis dan telaahan pengelolaan areal rawa akan lebih baik bila dikelola dengan sistem konservasi sehingga manfaatnya

dapat tetap terjaga secara berkesinambungan, mengingat upaya konservasi merupakan suatu bentuk upaya menjaga dan mendukung peningkatan kelestarian potensi keanekaragaman hayati sekaligus pemanfaatan secara lestari sehingga dapat tetap mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

Dari hasil penelitian Wetland Internasional (1994), rawa-rawa disekitar DAS tersebut merupakan wilayah yang sangat memenuhi kriteria Konvensi Ramsar sebagai wilayah pelestarian, dengan pertimbangan manfaat:

1. Merupakan contoh yang baik sebagai areal lahan basah alami atau mendekati alami yang khas untuk suatu wilayah biogeografi yang ditumbuhi oleh rumput *Phragmites* dan gelam (*Melaleuca cajuputi*)
2. Memiliki nilai penting bagi masyarakat sekitarnya dalam hal penyediaan makanan. Rawa-rawa ini menghasilkan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk sebagai sumber mata pencaharian.
3. Merupakan habitat sejumlah jenis tumbuhan atau hewan yang telah langka, rentan atau terancam kepunahan seperti jenis-jenis burung antara lain; Serati Hutan/Itik Rimba (*Cairina cinerea*), Burung Tongtong (*Leptopulos javanicus*), wilwo/Bluwok (*Mycteria cinerea*), Burung Jing (*Metopidius indicus*) dan Blibis (*Nettapus*

coromandelianus). Bangau tongtong dan wilwo adalah jenis burung yang terancam kepunahan di Indonesia dan telah tercatat dalam *Red Data book* dan IUCN dalam kategori *vulnerable*, sedangkan burung jing dan blibis adalah jenis burung yang telah langka.

4. Secara tetap lokasi ini menyokong kehidupan 1% populasi dunia dari suatu jenis atau anak jenis burung air. Sekurangnya 53 ekor atau lebih Burung wilwo di temukan di daerah rawa Tulang Bawang.
5. Merupakan kantong air atau penyimpan cadangan air serta pengendali limpasan air sungai pada musim hujan dimana tumbuhan rawa dapat memperlambat aliran air sehingga dapat menahan erosi dan banjir.
6. Merupakan pelindung terhadap bencana alam, karena tumbuhan rawa dapat menahan abrasi gelombang air laut dan akar tumbuhan rawa berfungsi mengikat bahan organik, menahan angin dan membantu pengendapan lumpur sedimen serta pencegah intrusi air laut karena adanya rawa-rawa dapat membuat air tanah menjadi jenuh dengan air tawar sehingga dapat menghambat masuknya air laut ke lapisan tanah.
7. Sebagai penjaga iklim mikro pada ekosistem yang ada di sekitarnya dengan cara mempertahankan penguapan lokal yang penting untuk menjaga kelembaban dan turunnya hujan. Selain itu vegetasi

lahan basah berpengaruh dalam proses hidrologis dan penguapan air serta mengurangi kecepatan air permukaan yang dapat merusak.

8. Memiliki potensi wisata dan rekreasi serta sarana penelitian.

Dari hasil penelitian Wetland Internasional ini sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka wilayah ini juga memenuhi kriteria **Important Bird Area** (IBA) yang dikeluarkan oleh Bird Life Internasional sehingga wilayah ini menjadi ekosistem yang sangat penting bagi Indonesia maupun dunia.

Pengelolaan rawa saat ini belum memiliki arah yang jelas serta kegiatan yang tidak melalui rencana yang cermat, sehingga nampak rawa seperti daerah "tidak bertuan". Beberapa masalah yang mengancam keberadaan DAS, antara lain :

1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi dan kawasan lindung oleh perkebunan dan kegiatan budidaya lainnya.
2. Aktivitas masyarakat sekitar dalam memanfaatkan rawa yang berpotensi merusak antara lain : menangkap burung-burung air, membuka areal persawahan dengan menebang pohon-pohon gelam pada saat rawa mulai mengering, menangkap ikan dengan racun dan setrum serta membuat lobang/siring sebagai tempat berkumpulnya ikan yang akan di penen pada saat rawa mulai

mengering, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

3. Wilayah DAS berpotensi ekonomi namun belum berkembang sesuai dengan kaidah konservasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.
4. Keberadaan hukum adat yang telah lama ditinggalkan baik oleh masyarakat adat telah menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dalam pemilikan lahan dan pengelolaan DAS secara arif.

Untuk mendorong terwujudnya kelestarian rawa sangat diperlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholders antara lain melalui penetapan sebagai wilayah yang berfungsi lindung dengan aturan hukum oleh pemerintah setempat serta lebih banyak melibatkan dan mengakomodir keberadaan masyarakat setempat melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat mempercepat terwujudnya rawa sebagai kawasan konservasi. Selain itu melaksanakan pula upaya-upaya antara lain:

- a. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup melalui penyuluhan-penyuluhan tentang pengetahuan ilmu lingkungan, pengetahuan tentang bagaimana melakukan konservasi, apa yang harus dilestarikan dan tehnik-tehnik pelaksanaan konservasi.
- b. Sistem informasi pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan

kegiatan penelitian guna menghimpun data pendukung seperti potensi keanekaragaman hayati, sosial ekonomi, publikasi dan dokumentasi bagi para stakeholder lingkungan.

- c. Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong keluarnya kebijakan ekonomi dalam pemanfaatan DAS yang dapat mendukung pendapatan asli daerah, dengan kriteria tidak merusak kawasan, signifikan untuk meningkatkan pendapatan, teknologi mudah dilaksanakan dan masyarakat mendukung pelaksanaannya.
- d. Bantuan bibit untuk sempadan sungai (tanaman tahunan) yang memiliki daya dukung terhadap erosi sempadan sungai sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
- e. Sosialisasi ke desa-desa transmigrasi di sekitarnya; mengingat wilayah ini juga dikelilingi masyarakat pendatang (transmigrasi), maka untuk mencapai sasaran dan tujuan juga dilakukan pendekatan agar terdapat kesamaan pandang secara keseluruhan dari masyarakat disekitar tentang wilayah pengelolaan sehingga upaya konservasi wilayah rawa dapat terwujud.
- f. Adanya kerjasama antara lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan rawa baik dalam bentuk kemitraan maupun dalam

bentuk lain yang saling menguntungkan salah satunya dalam wadah Kelompok Industri Peduli Lingkungan (KIPL).

3.2.7. Sumberdaya Pesisir dan Lautan

Pantai Bandar Lampung memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu terletak disuatu teluk yang sangat nyaman dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugus pulau kecil di tengah laut. Letak pantai tidak jauh dari pusat kota. Fisiotrafi tersebut memanjang dari Tarahan, Panjang, Way Lunik, Teluk Betung, Pesawahan sampai ke arah Lempasing.

Potensi alam yang digambarkan di atas sekarang sudah cukup memprihatinkan karena cukup banyak bukit/gunung yang dibuat perhotelan, perumahan dan bahkan diruntuhkan untuk mengambil tanahnya dan ditimbunkan ke daerah pesisir/laut. Dalam pengembangan kota pantai di Kota Bandar Lampung telah banyak dilaksanakan reklamasi pantai oleh pihak swasta (dengan izin atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung) yang seluruhnya diperkirakan mencapai lebih dari 350 ha.

Sepanjang pesisir Teluk Lampung selama ini (selain Pelabuhan Kapal Panjang) hanya terdapat perkampungan nelayan dan wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah tempat para nelayan itu mencari ikan,

baik nelayan laut dangkal maupun nelayan laut dalam, namun sekarang di sepanjang pesisir Teluk Lampung telah dikelilingi oleh sejumlah kegiatan ekonomi; seperti industri, hotel, rumah makan dan tempat hiburan lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rencana penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, laporan fakta analisis tahun 2003 menyatakan bahwa; telah terjadi pencemaran Teluk Lampung yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain buruknya kondisi muara sungai, adanya kegiatan ekonomi di sepanjang wilayah pesisir, serta struktur bangunan gedung yang dibangun di wilayah pesisir.

Merupakan suatu fakta, pembangunan gedung, industri di wilayah pesisir Teluk Lampung (di daerah Sukaraja dan Kota Karang) sudah tidak mentaati garis sempadan pantai yang diawali dengan melakukan penimbunan pantai dengan tanah yang diambil dari bukit atau gunung yang ada di daerah Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan atas izin atau kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang sudah dimulai dilakukan sejak tahun 1980. Padahal diketahui bahwa kesinambungan perkembangan dan kelestarian kawasan pantai sangat penting untuk menghindari terjadinya bencana alam seperti badai/tsunami lebih-lebih Lampung merupakan daerah patahan bumi seharusnya batas garis sempadan pantai ditaati. Bila mengikuti standar

internasional sejauh 2 mil/3,4 km dari garis pantai terluar atau titik surut terjauh hingga kearah daratan atau standar nasional adalah 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat, dan di daerah areal tersebut tidak boleh dilakukan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung.

Penimbunan wilayah pesisir selain memiliki dampak terhadap pencemaran laut dan merusak biota laut serta terumbu karang terutama karena sedimentasi, tentunya berdampak bagi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya kepada laut terutama dilihat dari sisi sosial, ekonomi.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bom merupakan masalah khusus yang terjadi di Teluk Lampung hal ini menyebabkan kerusakan terumbu karang yang pada umumnya merupakan kerusakan fisik, disamping kegiatan pengeboman, kegiatan penambangan batu karang untuk bahan bangunan dan hiasan juga menjadi ancaman kerusakan terumbu karang.

Menyadari kondisi tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Bapedalda Kota Bandar Lampung perlu mengembangkan program laut dan pesisir lestari atau yang disebut PROLESTARI.

Misi dari program PROLESTARI adalah melestarikan fungsi ekosistem wilayah laut dan pesisir/pantai, sehingga dapat berhasil dan berdaya guna bagi keberlanjutan pembangunan daerah khususnya

dan pembangunan nasional umumnya sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perairan pantai dan ekosistem pesisir, dengan cara :

- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan air laut melalui pengurangan beban pencemaran masuk ;
- Mengendalikan pencemaran dan kerusakan terumbu karang dan hutan bakau/mangrove;
- Meningkatkan sumberdaya kelembagaan dan peranserta masyarakat dalam upaya pemantauan, pengendalian, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan laut dan ekosistem pesisir.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari program ini adalah:

- Terkendalinya kualitas dan kuantitas hutan mangrove, terumbu karang, laut/perairan pantai.
- Berfungsinya green belt pantai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatnya kemanfaatan wilayah pesisir dan laut bagi kesejahteraan penciptaan lapangan kerja dan lapangan berusaha.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan program ini dibagi dalam 3 (tiga) paket wilayah ekosistem, yaitu:

- Paket wilayah dengan lingkup kerja Kawasan Pantai Wisata, dapat disebut kegiatan Pantai Wisata Bersih;
- Paket wilayah dengan lingkup kerja kawasan pelabuhan, dapat disebut kegiatan Bandar Indah;
- Paket wilayah dengan lingkup kerja ekosistem terumbu karang dan mangrove, dapat disebut Teman Lestari; Paket Kegiatan Program Laut dan Pesisir Lestari (PROLESTARI) antara lain :
 - Pengembangan percontohan terumbu karang buatan dengan menggunakan ban bekas pada lokasi desa Way Muli Kabupaten Lampung Selatan.
 - Penertiban/pengamanan green belt (hutan mangrove).
 - Penetapan batas sempadan pantai dan tata ruangnya melalui penyusunan tata ruang wilayah pesisir dan pulau kecil.
 - Pengembangan percontohan perbaikan (pemulihan) hutan mangrove melalui pola kemitraan.
 - Pengendalian limbah cair dan padat industri, limbah domestik wilayah pantai dan sarana transportasi laut (kapal besar dan nelayan).
 - Pemantauan/pengendalian/penertiban kegiatan reklamasi pantai.

Uraian kegiatan Program Laut dan Pesisir Lestari (PROLESTARI) antara lain :

- Inventarisasi dan identifikasi kerusakan (eksisting laut dan pesisir) dan sumber pencemar/perusakan pesisir dan laut, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :
 - Pengumpulan data kerusakan dan pencemaran baik melalui data primer maupun data sekunder, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain :
 - Dinas/Instansi Pemerintah terkait (Kehutanan, perikanan, perhubungan laut dan sebagainya).
 - Perguruan Tinggi (PSL) UNILA dan IPB.
 - Proyek-proyek penelitian (CRMP dan lain-lain).
 - LSM dan organisasi hobby lainnya seperti Persatuan Selani Lampung (Corona, Mahasiswa biologi).
 - Pembuatan peta wilayah kerusakan dan pencemaran laut dan pesisir atau pengadaan peta dari Bakorsertanal.
- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir dan nelayan, dengan kegiatan:
 - Pemasangan papan larangan dan himbauan ditempat-tempat wisata pantai, pelabuhan dan perkampungan pesisir (billboard).
 - Gerakan kebersihan massal bekerjasama dengan organisasi.

Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar serta organisasi profesi (Persatuan selam dan biologi).

- Pelatihan teknis pemantauan dan pemulihan kerusakan pesisir dan laut serta terumbu karang buatan.
- Pemutaran film penerangan tentang konservasi alam, bekerjasama dengan instansi terkait, di lokasi perkampungan pesisir dan nelayan.
- Penyebaran brosur, leaflet, selebaran, poster.
- Pengawasan kerusakan dan pencemaran pantai dan laut akibat limbah industri, domestik dan kapal/perahu nelayan, dengan cara :
 - Penandatanganan Surat Pernyataan PROLESTARI oleh penanggung jawab kegiatan diatas:
 - Industri oleh Pimpinan Perusahaan
 - Pemukiman oleh Kepala Desa/Lurah bersama Camat
 - Kapal dan nelayan oleh pemilik/Pimpinan Kapal.
 - Pengawasan/pemantauan lapangan secara periodik sesuai isi surat pernyataan.
- Pemulihan kerusakan terumbu karang dan hutan mangrove melalui :
 - Penggalangan kemitraan dunia usaha dan masyarakat pantai/nelayan, dalam rangka pemberdayaan fungsi ekonominya.

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

- Pembuatan percontohan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove (penghijauan/reboisasi hutan pantai).
- Pembuatan percontohan pengendalian sampah, pantai/laut (dengan cara penanaman rumput laut.
- Melakukan Audit lingkungan atas kegiatan reklamasi pantai dengan cara :
 - Penggalangan dana sharing dari pemilik beban reklamasi yang ada dalam sistem hamparan (Teluk Lampung atau wilayah pantai Kota Bandar Lampung).
 - Implementasi hasil audit lingkungan tersebut.

Dalam pelaksanaan program PROLESTARI melibatkan berbagai dinas/instansi dan kelembagaan serta pihak-pihak terkait, dibawah koordinasi BAPEDALDA Propinsi Lampung, antara lain :

1. Dinas/instansi Pemerintah, antara lain :
 - Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - BAPEDALDA Kota Bandar Lampung
 - Dinas Perikanan - Dinas Kehutanan
 - Dinas PU Pemukiman - Serta instansi lainnya.
 - Perhubungan Laut
2. Organisasi Pemuda dan profesi lainnya/LSM, antara lain :

- Persatuan Selam (CORONA, Mahasiswa Biologi).
 - Pecinta Alam (WALHI, WATALA, YAMAHA, ALAS, MITRA BENTALA, KEHATI).
3. Dunia usaha (petambak, nelayan, real estate, industri produk, pariwisata).

Dengan pengembangan prinsip kemitraan, maka sumber dana yang diperlukan untuk pelaksanaan PROLASTRI, berasal dari :

1. Pemerintah Pusat, Propinsi, dan kabupaten/Kota (Instansi terkait).
2. Investor, sharing dunia usaha lain.
3. Revolving fund (dana berputar).
4. Dan sumber dana yang tidak mengikat.

3.2.8. Keanekaragaman Hayati

Salah satu tujuan pembangunan hutan selain untuk meningkatkan amenitas lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Pesatnya pembangunan diikuti dengan penambahan jumlah penduduk dapat menyebabkan semakin berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna karena semakin sempitnya kawasan yang menjadi tempat kehidupan mereka.

Berbagai jenis flora dan fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang masih banyak ditemukan di daerah Lampung perlu

dilakukan upaya antisipasi agar populasi biota tersebut dapat dipertahankan dan dapat hidup di alam bebas.

Penurunan berbagai jenis flora dan fauna yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya perburuan liar dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur ketentuan terhadap berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi atau kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap jenis satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi.

Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan kelestarian keanekaragaman flora dan fauna dilakukan melalui penetapan kawasan-kawasan cagar alam, hutan lindung serta upaya penghijauan dan reboisasi yang memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan keanekaragaman hayati.

3.3. Sumberdaya Buatan

3.3.1. Perekonomian Daerah Lampung

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung kepada

potensi sumberdaya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Dalam penyajiannya PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, di mana saat ini digunakan tahun dasar 1993. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perekonomian daerah seperti yang digambarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hakekatnya adalah serangkaian kebijakan dan urutan pelaksanaan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Perekonomian suatu daerah digambarkan pada label Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dibagi atas lapangan usaha atau sektor/sub sektor ekonomi. PDRB terdiri dari 9 sektor ekonomi yaitu:

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas, dan air minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Transportasi dan komunikasi
8. Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

Gejolak krisis ekonomi secara nasional sejak tahun 1998 masih berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Daerah Lampung. Tinggi suku bunga bank menyebabkan investasi terhadap sektor-sektor produktif sangat rendah atau kalau mungkin dapat dikatakan hampir tidak ada. Selain itu faktor gejolak politik sangat mempengaruhi gairah iklim investasi di Daerah Lampung akibat banyaknya aksi demonstrasi dan penjarahan yang sangat mengganggu aktivitas dan kegiatan serta kenyamanan berusaha.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 didukung oleh sektor-sektor yang diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan antara lain dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan non migas, serta beberapa sektor pembangunan lainnya. Indikator pertumbuhan ekonomi Propinsi

Lampung seperti yang terlihat pada tabel SDB-1 memberikan gambaran fluktuasi pada beberapa sektor ekonomi, kondisi ini menjadi asumsi dan dasar harapan semakin baiknya kondisi ekonomi pada tahun 2003. Pada tahun 2003 beberapa sektor dominan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan tidak lagi terdapat sektor dan sub sektor yang mengalami pertumbuhan negatif seperti pada tahun-tahun awal krisis ekonomi.

3.3.2. Sektor Pertanian Dalam Arti Luas

Pertanian Tanaman Pangan

Kota Bandar Lampung merupakan daerah salah satu yang memasok hasil produksi tanaman pangan ke Jakarta, luas panen tanaman pangan seperti yang tergambar pada Tabel SDB-14 tahun 2004. Dari luasan tersebut luas panen terbesar adalah padi sawah yaitu 8.199, disusul ubi kayu seluas 2.030 ha.

Alih fungsi lahan khususnya beberapa komoditas unggulan tersebut sebaiknya dihindarkan, mengingat semakin sempitnya lahan produktif. Dengan demikian pelestarian ekosistem tumbuhan lahan spesies daerah akan terjaga dengan baik.

Perkebunan

Kegiatan perkebunan masyarakat Kota Bandar Lampung adalah perkebunan rakyat. Jenis yang ditanam adalah kelompok pohon. Kelompok pohon banyak ditanam di ladang dan pekarangan. Komoditas kelompok pohon yang menonjol adalah kelapa luas 904 Ha dengan produksi 286 ton, panili (basah) luas 169 Ha dengan produksi 66 ton, cengkeh luas 154 Ha dengan produksi 41 ton, coklat luas 142 Ha dengan produksi 28 ton, serta kopi luas 113 Ha dengan produksi 36 ton.

Pada saat ini terlihat bahwa potensi perkebunan kelompok pohon masih bisa ditingkatkan produktifitasnya disamping pemanfaatan bagian lain yang terbuang (seperti kelapa dan lain-lain) yang belum dilakukan. Dari sudut lingkungan penggalakan tanaman kelompok pohon akan beredampak positif terhadap kualitas udara. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa perkebunan yang terluas berada dikecamatan tanjungkarang Timur seluas 585 Ha, dan Kecamatan Kemiling 322 Ha.

Produksi Komoditas Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 408/KPTS/11/1993 tanggal 10 Agustus 1993 telah ditetapkan kawasan hutan lindung (KHL) Gunung Betung Reg. i 9 sebagai Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (TAHUNA WAR) seluas 22.249,31 Ha (sesuai hasil tata batas).

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Adapun luas dan fungsi hutan kota di Kota Bandar Lampung berdasarkan SK Menhutbun Nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan hasil tata batas kawasan hutan sebagai berikut :

No.	Nama Kawasan	Nomor Register	Fungsi dan Luas Hutan (Ha)		Keterangan
			TN/Suaka	HL	
1	TAHURA WAR	Reg. 19	300	-	22.249,31
2	Batu Serampok	Reg. 17	-	100	7.230**
	Jumlah		300	100	

Keterangan : **) = Sudah di tata Batas

Sedangkan Kota Bandar Lampung memiliki hutan kota seluas 9 Ha yang terletak di kelurahan way dadi Kecamatan Sukarame namun hutan kota tersebut telah mengalami kerusakan sebesar 40 % (sumber Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota). Hal ini diakibatkan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya fungsi hutan yangmana fungsi hutan antara lain sebagai pengatur tata air, pengawetan plasma nutfah, sumber keanekaragaman hayati, pariwisata, penelitian dan rekreasi

Untuk tipe vegetasi pada umumnya merupakan hutan sekunder jenis vegetasi alami terdesak oleh vegetasi budaya. Masih terdapat 72 jenis vegetasi liar yang ada didalam kawasan hutan, namun keberadaan sudah mulai jarang, sedangkan jenis vegetasi yang dibudidayakan oleh masyarakat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar antara lain, kopi, durian, alpokat, tangkil dan petai.

Perikanan

Budidaya perikanan laut merupakan pemasuk protein terbesar di bidang ini kemudian disusul perikanan darat. Lebih murah harganya komoditas ini dibandingkan daging menjadikan ikan menjadi pilihan. Jenis ikan yang ditangkap untuk wilayah perairan Lampung timur dan Teluk Lampung yang menjadi pendapatan masyarakat nelayan Kota Bandar Lampung meliputi : ikan sebelah, peperen, manyung, bambaiigan, kerapv, keropi, lerneru, kurisi, ekor kuning, bawal hitam, alu-alu, selar, kuwer, tetengker, julungjulung, teri, lemuru, balok-balok, kembung, layur hitam dan tongkol. Sedangkan penyediaan pakan alami dengan menggunakan limbah industri organik (tahu, dan tempe) perlu diteliti agar kegiatan ekonomi tersebut tidak berhenti.

Produksi perikanan laut yang berasal dari Teluk Lampung semakin menurun dengan semakin rusak ekosistem terumbu karang akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Kebanyakan terumbu karang di Lampung adalah jenis "*fringing reefs*" dengan luasan 20 - 60 meter mengalami kerusakan 60 - 75% selain karena pemboman kerusakan tersebut juga akibat erosi, sedimentasi, dan penambangan karang untuk bahan bangunan.

Peternakan

Budidaya peternakan yang digeluti masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sapi, kambing, domba, ayam, itik, dan kerbau belum banyak dikembangkan. Pada umumnya masalah pakan dan lahan menjadi

kendala budidaya ini. Pemanfaatan sampah sebagai pakan hijauan dan penanaman rumput merupakan upaya penanganan masalah ekonomi peternak sekaligus membantu menangani masalah lingkungan.

Kebijaksanaan keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani sebagai subjek tidak terlepas dari stratifikasi sosial ekonomi mereka. Faktor determinan yang menentukan operasionalisasi keberpihakan diantaranya pola keberpihakan lahan garap, suatu indikator yang selanjutnya mengklasifikasikan skala keberpihakan sesuai dengan strata sosial ekonomi petani yaitu petani pemilik, petani penggarap, dan buruh tani.

Di lain pihak, sumber-sumber pertumbuhan lain seperti tumbuhannya pelaku-pelaku ekonomi yang informal dan mandiri, yang intinya bersumber pada peranserta dan kemampuan masyarakat juga sangat dibutuhkan kerana kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak dapat hanya dengan mengandalkan pada ketersediaan investasi modal dan ketersediaan tenaga kerja saja. Pembangunan ekonomi di era reformasi telah mulai mengarahkan pada arah yang benar, yaitu pembangunan untuk rakyat dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan rakyat sebagai pelaku utama yang mandiri dan tangguh.

3.3.3. Pencemaran Udara

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik, pusat-pusat industri dan transportasi, kualitas udara mengalami perubahan.

Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Kep. Meneg. KLH Nomor KEP.02/MENLWI/195).

Kualitas udara saat ini telah menjadi persoalan global, karena udara telah tercemar akibat dari berbagai aktivitas manusia dan proses alam. Berbagai macam gas yang ada di udara adalah merupakan selimut permukaan bumi yang sangat labil kondisinya karena sifatnya yang sangat mudah dipengaruhi oleh cuaca dan iklim.

Pencemaran udara secara alamiah diakibatkan oleh letusan gunung berapi, serbuk tepungsari, spora yang terbawa angin, kebakaran hutan, serta debu akibat erosi dan tanah longsor. Sedangkan pencemaran udara akibat aktivitas manusia antara lain adalah adanya pembangunan industri-industri, pabrik, lalu lintas kendaraan yang makin padat yang semua makin menambah aneka

macam kadar zat pencemar udara.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka Pemerintah Propinsi Lampung dalam melaksanakan aktivitas pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) menggunakan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (PP No. 41 Tahun 1999).

Sumber Pencemaran dan Beban Pencemaran Udara

Sumber pencemaran udara di Kota Bandar Lampung secara umum terdiri dari 2 (dua) sumber utama pencemaran yaitu dari sumber utama yang tidak bergerak dan sumber utama yang bergerak.

Sumber utama yang tidak bergerak

Kegiatan industri pengolahan adalah proses aktivitas industri dengan menggunakan teknologi guna menghasilkan barang. Disamping proses produksi yang merupakan sumber pencemaran, kegiatan pembakaran bahan bakar yang dipergunakan untuk proses utilitas industri juga merupakan sumber pencemaran udara.

Menurut hasil analisa laboratorium kualitas udara dari lokasi industri yang telah dilakukan pengukuran kualitas udara menunjukkan adanya kualitas udara yang berada di bawah ambang batas/baku mutu.

macam kadar zat pencemar udara.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka Pemerintah Propinsi Lampung dalam melaksanakan aktivitas pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) menggunakan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (PP No. 41 Tahun 1999).

Sumber Pencemaran dan Beban Pencemaran Udara

Sumber pencemaran udara di Kota Bandar Lampung secara umum terdiri dari 2 (dua) sumber utama pencemaran yaitu dari sumber utama yang tidak bergerak dan sumber utama yang bergerak.

Sumber utama yang tidak bergerak

Kegiatan industri pengolahan adalah proses aktivitas industri dengan menggunakan teknologi guna menghasilkan barang. Disamping proses produksi yang merupakan sumber pencemaran, kegiatan pembakaran bahan bakar yang dipergunakan untuk proses utilitas industri juga merupakan sumber pencemaran udara.

Menurut hasil analisa laboratorium kualitas udara dari lokasi industri yang telah dilakukan pengukuran kualitas udara menunjukkan adanya kualitas udara yang berada di bawah ambang batas/baku mutu.

Dari hasil pengukuran kualitas udara pada beberapa pabrik secara keseluruhan dengan parameter yang digunakan menunjukkan bahwa kadar pencemaran udara masih di bawah ambang batas kecuali beberapa pabrik/industri yang melebihi ambang batas/baku mutu terutama pada unsur debu yang terbesar di lokasi pabrik, polutan debu yang tertinggi pada saat pabrik produksi waktu siang hari dimusim kemarau. Sebagai upaya antisipasi dilakukan berbagai upaya antara lain melakukan penyiraman pada areal sekitar pada musim kemarau sedangkan pada musim hujan kualitas udara pada lokasi tersebut masih dalam ambang batas baku mutu udara.

Sumber Pencemaran Bergerak

Salah satu dampak negatif dari kegiatan sektor transportasi dan angkutan terhadap lingkungan hidup adalah terjadinya pencemaran udara. Sumber pencemar utama dari sumber bergerak adalah kendaraan bermotor dengan polutan berupa karbon monoksida sebesar lebih kurang 60% dan polutan berupa hidrokarbon berkisar lebih kurang 15%.

Emisi kendaraan bermotor sangat potensial menimbulkan pencemaran udara. Penggunaan bensin bertimbal (Pb) mempunyai andil yang besar dalam menurunkan kualitas udara terutama akibat komponen timbal (Pb) yang terlepas ke udara bebas. Selain itu emisi

kendaraan bermotor juga mengandung CO dan HC yang berperan dalam menurunkan kualitas udara.

Berdasarkan hasil analisa kualitas udara di kota Bandar Lampung yang diambil berdasarkan sampel pengukurannya di Terminal Panjang, Terminal Pasar Bawah dan Terminal Rajabasa yang lokasinya berdekatan dengan Pusat Kota, Pelabuhan Laut, jalan lingkar luar untuk kendaraan berat lintas Sumatera, perlintasan kereta api pengangkut batubara ke Pelabuhan Tarahan serta merupakan terminal dalam/antar kota dan antar propinsi serta terminal terbesar di Propinsi Lampung menunjukkan hasil yang masih di bawah batas toleransi kecuali parameter Carbon Monoksida (CO) akibat pembakaran yang tidak sempurna dan Debu (Dust), namun secara umum kualitas udara di Bandar Lampung masih relatif baik.

Sebagai upaya pengendalian pencemaran akibat buangan kendaraan bermotor tersebut dilakukan pembatasan masa berlaku izin trayek (izin operasional) serta rekomendasi perawatan kendaraan pada saat pemberian/perpanjangan izin kiur (layak jalan) setiap 6 (enam bulan) sekali oleh institusi berwenang.

Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara adalah suatu upaya yang

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan kadar pencemaran udara dari sumber. Secara umum kondisi kualitas udara di Kota Bandar Lampung masih relatif baik, meskipun demikian upaya pencegahan dan mempertahankan kondisi tersebut melalui kegiatan monitoring secara berkala terhadap industri-industri potensi sumber pencemar tetap dilakukan, dikaitkan pula dengan telah adanya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 660.33/0298/Bapedalda/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pemeriksaan Mutu/ Kualitas Udara di Daerah.

Kegiatan pengendalian pencemaran udara juga dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi peraturan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan dunia usaha, terutama pada industri-industri yang dalam proses produksinya berpotensi besar menyebabkan pencemaran udara. Upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh berbagai pihak yang melibatkan seluruh komponen masyarakat merupakan langkah nyata untuk terlaksananya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh berbagai pihak tersebut antara lain :

a. Peran Pemerintah Daerah

- Pengendalian pada tahap perencanaan, yang pelaksanaannya

- disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengendalian pada tahap pelaksanaan operasional, seperti pemasangan alat hisap debu dan penetapan emisi standar, baik yang bergerak maupun tidak.
 - Pemantauan dan Pengawasan terhadap emisi atau ambien dan upaya pengendalian oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan
 - Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman Hutan Kota serta penyelamatan jalur hijau di wilayah perkotaan sebagai paru-paru kota.
 - Penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan terutama kendaraan angkutan kota dengan pembatasan ijin trayek dan wajib uji kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah.
 - Pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara pada beberapa titik yang rawan polusi akibat kepadatan lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukannya pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi.
 - Pemberian sanksi hukum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Peranserta masyarakat dan mitra lingkungan

- Mendukung program pemerintah melalui peransertanya dalam langkah-langkah sosialisasi dilingkungannya dengan pemahaman dan ketaatannya terhadap kelestarian lingkungan.
- Mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam pelaksanaan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di wilayah kota.

3.3.4. Pencemaran Air

Salah satu sumber kekayaan alam yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menopang kelangsungan hidup adalah air. Air yang sangat terbatas ini pada umumnya oleh manusia digunakan untuk kebutuhan domestik, pembangkit tenaga listrik, kelangsungan proses industri, kegiatan perikanan, pertanian, peternakan dan lain-lain. Secara alami sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat dipengaruhi dan mempunyai daya regenerasi mengikuti suatu daur ulang yang disebut siklus hidrologi (Suryani, 1987). Keterbatasan air sangat dipengaruhi oleh keseimbangan yang dapat mempengaruhi daur hidrologi tersebut yaitu terganggunya kehidupan ekosistem yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian air merupakan salah satu sumberdaya alam

yang mutlak dibutuhkan bagi kehidupan manusia di dunia, karena sebagai bahan baku air bersih bagi kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup lainnya.

Jenis Pencemaran Air

Pencemaran Air (PP, Nomor 20 tahun 1990) adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, atau proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sumber Pencemaran Air

Pencemaran air pada umumnya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Besar kecilnya pencemaran akan tergantung dari jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kesungai, baik limbah padat maupun cair.

Berdasarkan jenis kegiatan maka sumber pencemaran air dibedakan menjadi :

- a. Effluent industri pengolahan; effluent adalah pencurahan limbah cair yang masuk kedalam air bersumber dari pembuangan sisa produksi, lahan pertanian, peternakan dan kegiatan domestik.
- b. Sumber domestik/buangan rumah tangga; menurut peraturan Menteri Kesehatan, yang dimaksud dengan buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal bukan dari industri melainkan berasal

dari rumah tangga, kantor, hotel, restoran, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar, pertokoan dan rumah sakit.

Upaya Pengendalian Pencemaran Air

Upaya penurunan beban limbah khususnya dan kegiatan industri pengolahan dilakukan melalui intensitas pemantauan kualitas lingkungan (sungai), penataan baku mutu limbah cair daerah (BMLCD), penegakan hukum, peningkatan peranserta masyarakat serta Program Kali Bersih (Prokasih) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989/1990 yang telah berhasil menurunkan beban limbah total pada DAS prioritas prokasih selama 10 tahun terakhir dari beban limbah cair menurun sebesar 90%, meskipun demikian beban aktual tersebut masih cukup tinggi.

Upaya pengendalian pencemaran air dilakukan pula prinsip "*Reward and Punishment* " dimana bagi kegiatan usaha yang melalaikan kewajibannya dan beban limbahnya melampaui baku mutu akan dikenakan sanksi penegakan hukum sesuai dengan tahapan yang ditentukan meliputi teguran, peringatan, sanksi administrasi berupa penutupan saluran limbah atau ditingkatkan ke arah penyidikan oleh kepolisian. Selanjutnya bagi kegiatan usaha yang telah memenuhi kewajibannya dalam waktu periode tertentu akan diberikan penghargaan.

Upaya-upaya lain yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran secara berkala melalui kewajiban dari setiap penanggungjawab kegiatan untuk memeriksakan limbah cairnya serta melaksanakan swapantau, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan RKL/RPL kegiatan wajib Amdal serta UKL/UPL, upaya peningkatan perbaikan sungai, serta sosialisasi kebersihan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat.

3.3.5. Limbah Padat

Limbah padat dapat didefinisikan sebagai suatu hasil buangan berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari proses industri pengolahan maupun non industri pengolahan.

Sumber Limbah Padat

Di Kota Bandar Lampung limbah padat yang ada bersumber dari industri pengolahan dan non industri pengolahan.

Limbah Padat dari Industri Pengolahan

Berbagai industri pengelolaan yang menghasilkan limbah padat antara lain adalah :

- a. Industri tahu tempe mengeluarkan limbah padat berupa ampas.
- b. Industri rumah potong hewan mengeluarkan limbah padat berupa jeroan, kaki, dan tulang-tulang.

- c. Industri kopi mengeluarkan limbah padat berupa kulit biji (hasil sortasi) dan ampas.
- d. Industri penyamakan kulit mengeluarkan limbah padat berupa kulit bulu dari proses penyamakan dengan krum.
- e. Industri makanan/minuman mengeluarkan limbah padat.

Limbah padat dari industri pengolahan ini hanya sebagian kecil yang diproses melalui daur ulang menjadi bahan lain.

Limbah Padat non Industri Pengolahan

Sumber limbah padat dari industri non pengolahan yaitu limbah padat yang berasal dari berbagai sektor kegiatan antara lain limbah padat dari sektor domestik. Limbah domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari tempat-tempat umum.

Limbah padat dan sektor domestik ini banyak dipengaruhi oleh asal-usul sumber limbah padat yang ada terutama di daerah perkotaan berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga). Jumlah limbah padat non-industri yang diproduksi di Kota Bandar Lampung telah mendekati angka 1.000 m³/hari, dengan penghasil terbesar adalah wilayah Kota Bandar Lampung.

Upaya Pengendalian dan Penanggulangan Limbah Padat

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pencemaran, Pemerintah Propinsi Lampung melakukan upaya pengendalian limbah padat melalui beberapa langkah kegiatan antara lain menerapkan suatu ketentuan yang telah diberlakukan sesuai dengan Tata Ruang Daerah dan ketentuan yang berlaku, maka setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka semua jenis kegiatan yang berdampak penting disyaratkan untuk menyusun AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL.

Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perizinan yang dimohonkan dan sesuai dengan batas kewenangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Langkah awal kegiatan ini telah dilakukan melalui sosialisasi Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya pencemaran.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi limbah padat yang terjadi akibat dari limbah padat industri pengolahan maupun non industri pengolahan antara lain sebagai berikut :

1. Proses daur ulang, proses ini dilakukan bagi limbah padat yang dapat dimanfaatkan kembali baik oleh pengusaha, pekerja, maupun oleh masyarakat setempat.
2. Pelatihan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam upaya daur ulang sampah melalui komposting di desa Sumber Rejo Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung.
3. Proses pembuangan akhir, proses ini dilakukan oleh pengusaha dilingkungan usaha dengan proses tertentu maupun dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Limbah padat non industri pengolahan umumnya dihasilkan dari sampah rumah tangga dari berbagai tingkat pendapatan dan kepadatan pemukiman di kota pada umumnya.

3.4. Sumberdaya Manusia

3.4.1. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk yang terus meningkat perlu dicermati karena

(*push factor*) dari daerah asal antara lain sempitnya lapangan kerja, kurangnya SDA, dan faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan antara lain tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mapan dan sebagainya.

3.4.2. Fertilitas

Pertumbuhan penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen pokok, yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan (*migrasi*). Faktor kelahiran selalu dikaitkan dengan jumlah kelahiran hidup dengan jumlah penduduk suatu daerah pada suatu tahun tertentu. Faktor penting lainnya yang sangat berpengaruh terhadap aspek demografi adalah fertilitas. Fertilitas atau kelahiran adalah hasil reproduksi dari seorang wanita. Angka fertilitas suatu wilayah terkait erat dengan masalah kesehatan pada suatu daerah, demikian pula dengan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).

Program KB yang mencanangkan cukup dua anak tampaknya telah dicapai oleh penduduk Lampung. Dua faktor yang secara langsung mempengaruhi penurunan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yaitu penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan untuk menjaga jarak kelahiran serta mencegah kehamilan dan penundaan usia perkawinan bagi wanita yang dapat

memperpendek masa reproduksi sehingga jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit.

3.4.3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa karena pendidikan memiliki andil yang besar untuk kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh orang yang meningkatkan pendidikan tersebut (*private rate to return*).

Pendidikan yang memadai sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah menunjukkan tingginya kemampuan sumberdaya manusia.

Dalam pengembangan keterampilan penduduk, maka indikator status pendidikan memberikan gambaran yang penting. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia harus diikuti dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, mutu pendidikan dan tenaga guru yang memadai.

memperpendek masa reproduksi sehingga jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit.

3.4.3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi suatu bangsa karena pendidikan memiliki andil yang besar untuk kemajuan bangsa, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh orang yang meningkatkan pendidikan tersebut (*private rate to return*).

Pendidikan yang memadai sangat dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah menunjukkan tingginya kemampuan sumberdaya manusia.

Dalam pengembangan keterampilan penduduk, maka indikator status pendidikan memberikan gambaran yang penting. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia harus diikuti dengan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, mutu pendidikan dan tenaga guru yang memadai.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio/GER*) dan Angka Partisipasi Murni (*Net Enrollment Ratio/NER*). GER adalah perbandingan jumlah murid yang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk pada usia sekolah tersebut, sedangkan NER adalah perbandingan jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap total penduduk usia sekolah tersebut.

Peran lembaga pendidikan swasta diatas cukup dominan perlu diberikan bimbingan dan pengawasan yang baik, sehingga mutu dan jumlah lulusan dapat terus meningkat.

Kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah yang akan menyebabkan sulitnya adaptasi terhadap perubahan aspek kehidupan terutama yang berhubungan dengan perekonomian. Sebaliknya sumberdaya manusia yang diperlukan dalam memasuki abad baru dan era milenium ketiga ini adalah manusia yang berkualitas, baik dari segi intelektualitas dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan usaha serius dalam pengembangan pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun keimanan, peningkatan kesehatan, dan dukungan faktor-faktor sosial lainnya.

Usaha pengembangan pendidikan tinggi (akademi/S1) terus dilakukan tetapi masalah dalam meningkatkan kualitas dan output pendidikan S1 dan tingginya tingkat pengangguran sarjana. Tingkat pengangguran tinggi akibat rendahnya keterampilan tenaga kerja dan laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi.

3.4.4. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Dalam konsep ketenagakerjaan BPS, penduduk berumur 15 tahun ke atas disebut penduduk usia kerja atau biasa disebut dengan tenaga kerja (*man power*). Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan atau disebut penduduk yang aktif secara ekonomi (*Economically Active Population*) sedangkan sisanya yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya digolongkan sebagai bukan angkatan kerja (*Non Economically Active Population*). Akan tetapi sejalan dengan wajar 9 tahun, maka definisi angkatan kerja tidak lagi menggunakan batasan umur 10 tahun keatas melainkan 15 tahun ke atas, karena mereka yang berumur 14 tahun ke bawah diharapkan masih duduk di bangku sekolah dan tidak segera masuk ke dalam angkatan kerja.

Untuk mengatasi masalah sumberdaya manusia, kebijakan yang ditempuh dalam menanggulangi masalah sosial ekonomi dan

kependudukan tersebut menjadi sangat kompleks karena keterkaitannya dengan berbagai sektor, tetap harus dilanjutkan antara lain :

- a. Peningkatan anggaran pendidikan, dengan prioritas rehabilitasi lokal, penambahan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
- b. Penambahan tenaga guru dan distribusi guru yang cukup pada daerah terpencil dan pulau.
- c. Pembukaan lapangan kerja seluas luasnya untuk menampung tenaga kerja potensial, korban PHK dan mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan potensi SDA dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

BAB IV REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi keterkaitan antara kebijaksanaan implemantasi kegiatan dan fakta lingkungan hidup hingga tahun 2005 maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah, kebijaksanaan pengelolaan lingkungan harus tetap melihat Kota Bandar Lampung sebagai suatu "*environmental unit*" untuk menghasilkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan (*Sustainable Development*), dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis dan Kebijaksanaan Pembangunan di Kota Bandar Lampung.
2. Perlunya ditingkatkan penegakan supremasi hukum di bidang lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi pihak pengelola usaha/industri untuk dapat melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.
3. Tingkat partisipasi dan kepedulian seluruh pihak menunjukkan peningkatan yang berarti terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup

REKOMENDASI

guna menuju peningkatan kualitas lingkungan yang sesuai dengan standar baku mutu.

Dari uraian evaluasi keterkaitan dan implementasi program serta kualitas lingkungan hidup saat ini, terlihat kualitas lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung secara umum masih perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu disusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau aksi pembangunan yang berlandaskan pada program prioritas lima tahun pengelolaan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan arah kebijaksanaan dan strategi masing-masing program.

Untuk mewujudkan keserasian antara kegiatan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan, berdasarkan evaluasi dan kesimpulan pada bagian terdahulu tergambar bahwa terjadi degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat dari kebijaksanaan dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu disusun program-program yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

REKOMENDASI

1. Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Induk Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, yang merupakan program terpadu yang melibatkan multi pihak yaitu pemerintah, masyarakat umum dan dunia usaha.
2. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam, untuk mengantisipasi adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan standar baku mutu.
3. Penghijauan, reboisasi, dan penghijauan hutan kota dengan lebih mengembangkan pola kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha.
4. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah perlu ditingkatkan melalui program Pemerintah terutama dalam pemisahan sampah organik dan anorganik sebelum dibawa ke TPA. Dengan demikian bebann *sanitary land fill* tidak terlalu berat. Sistem *sanitary landfill* yang baik akan mendukung proses dekomposisi sampah organik. Disamping itu pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi kompos perlu dimasyarakatkan. Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru tampaknya sudah saatnya dikembangkan. Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi yang murah dan tidak mencemari lingkungan.

REKOMENDASI

5. Pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL, dilakukan melalui pengendalian pembangunan diantaranya industri, rumah sakit, rumah makan, dan hotel yang diarahkan pada pengembangan industri bersih, yaitu industri yang hemat lahan dan air, non polusi serta menyerap banyak tenaga kerja sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
6. Asap kendaraan merupakan sumber hampir seluruh karbon monoksida yang dikeluarkan di banyak daerah perkotaan. Karena itu strategi penurunan kadar karbon monoksida yang berhasil bergantung terutama pada pengendalian emisi otomatis seperti pengubah katalitis, yang mengubah sebagian karbon monoksida menjadi karbon dioksida. Kendali semacam itu secara nyata telah menurunkan emisii dan kadar konsentrasi karbon monoksida yang menyelimuti kota-kota di seluruh dunia industri.
7. Kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat, dimana pengembalian dampak lingkungan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan perlu keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.
8. Melakukan pendidikan lingkungan terhadap masyarakat secara terus menerus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuannya sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta

REKOMENDASI

dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini dapat dimulai dari anak-anak usia TK, SD, SMP dan SMA.

9. Memperbaiki, menjaga dan mengembangkan fungsi konservasi kawasan bukit, pesisir/pantai, perairan laut dan pulau.
10. Mengelola sumber daya air dan tanah sebagai upaya mewujudkan pelestarian sumber daya, guna menunjang pembangunan berkelanjutan melalui program konservasi, pengawasan pengambilan air tanah, dan peningkatan pelayanan air bersih.
11. Mengembangkan penerapan konsep produksi bersih dan nir limbah (*cleaner production* dan *zero emission*) di berbagai industri.
12. Penerapan sistem informasi lingkungan dalam mendukung program kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan.